

**PENGARUH PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN DAERAH
DAN AKSESIBILITIS LAPORAN KEUANGAN DAERAH
TERHADAP TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KOTA BANDA ACEH**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan
Syarat-syarat Guna Mencapai
Gelar Sarjana Ekonomi

Oleh

**FITRIA
1215020213**



**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SERAMBI MEKKAH
BANDA ACEH
2015**

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, hidayah, kekuatan dan kesehatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul "**Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah Dan Aksesibilitis Laporan Keuangan Daerah Terhadap Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Banda Aceh**". Penulisan ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Serambi Mekkah Banda Aceh. Selanjutnya selawat dan salam kepada junjungan alam Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa syiar Islam di atas muka bumi ini.

Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis telah berusaha semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan dan pengalaman yang penulis miliki. Namun penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dalam isi maupun teknis penulisannya. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan adanya pandangan pikiran, berupa kritik dan saran dari berbagai pihak demi kesempurnaan penulisan ini. Pada kesempatan ini, perkenankan penulis mengucapkan ribuan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Ayahanda dan Ibunda yang telah mendidik, membesarkan, serta mencurahkan kasih sayangnya kepada penulis guna tercapainya cita-cita.

2. Bapak Saiful Amri, SE, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Serambi Mekkah Banda Aceh dan sekaligus dosen pembimbing pertama yang telah banyak memberikan saran dalam penulisan skripsi ini
 3. Bapak Zainuddin, SE, M.Si selaku Ketua Jurusan Akuntansi Universitas Serambi Mekkah Banda Aceh.
 4. Ibu Rulfah M. Daud, SE AK, M.Si sebagai dosen pembimbing kedua yang telah banyak menyumbangkan waktu dan pikirannya demi kesempurnaan skripsi ini.
 5. Kepada pegawai pada Balaikota Banda Aceh yang telah bersedia memberikan data dengan cara berpartisipasi dalam pengisian kuesioner penelitian.
 6. Teman-teman satu angkatan terutama jurusan Akuntansi yang tidak mungkin penulis sebutkan namanya satu persatu, terima kasih banyak atas bantuan dan dorongan yang telah diberikan, sehingga penulisan skripsi ini dapat terlesaikan.
 7. Segenap Dosen-Dosen Pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Serambi Mekkah Banda Aceh yang pernah membagi segala pengetahuannya kepada penulis.
- Aakhirnya kepada Allah SWT jualah kita berserah diri, karena segala sesuatu tidak akan terjadi jika bukan atas kehendak-Nya. Amin ya rabbal 'alamin.

Banda Aceh, April 2015

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGATAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vii
ABSTRAK	viii
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	7
 BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN	 8
2.1 Pengertian Transparansi	8
2.2 Tujuan Transparansi.....	10
2.3 Pengertian Akuntabilitas.....	10
2.4 Faktor-Faktor Akuntabilitas.....	12
2.5 Laporan Keuangan Daerah.....	13
2.6 Tujuan Penyajian Laporan Keuangan Daerah	14
2.7 Aksesibility Laporan Keuangan Daerah	16
2.8 Penelitian Sebelumnya.....	17
2.9 Kerangka Pemikiran.....	20
2.10 Hipotesis Penelitian	20
 BAB III METODE PENELITIAN	 22
3.1. Lokasi dan Objek Penelitian	22
3.2. Populasi dan Sampel	22
3.3 Teknik Pengumpulan Data.....	23
3.4 Skala Pengukuran.....	23
3.5 Definisi dan Operasional Variabel.....	24
3.6 Metode Analisis Data.....	26
3.7 Uji Validitas Dan Uji Reliabilitas	27
3.7.1 Uji Validitas	27
3.7.2 Uji Reliabilitas	27
3.8 Uji Hipotesis	28
3.8.1 Uji Simultan	28
3.8.2 Uji Parsial.....	29

BAB IV HASIL PENELITIAN.....	31
4.1 Gambaran Umum Kota Banda Aceh	31
4.2 Visi Misi Kota Banda Aceh.....	33
4.3 Struktur Organisasi	35
4.4 Hasil Pengujian Instrumen.....	36
4.4.1 Pengujian Validitas	36
4.4.2 Pengujian Reliabilitas	38
4.5 Persepsi Responden Terhadap Indikator Penelitian.....	39
4.5.1 Persepsi Responden Terhadap Penyajian Laporan Keuangan Daerah.....	39
4.5.2 Persepsi Responden Terhadap Aksesibilitis Laporan Keuangan Daerah.....	42
4.5.3 Persepsi Responden Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas	43
BAB V PEMBAHASAN	46
5.1 Analisis Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah Dan Aksesibilitis Laporan Keuangan Daerah Terhadap Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Banda Aceh	46
5.1.1 Koefisien Regresi (β)	47
5.1.2 Koefisien Korelasi dan Determinasi	48
5.2 Pembuktian Hipotesis	49
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN.....	51
6.1 Kesimpulan	51
6.2 Saran	53
DAFTAR PUSTAKA	54

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Penelitian Sebelumnya	19
Tabel 3.1 Populasi dan Sampel	23
Tabel 3.2 Skala Pengukuran.....	24
Tabel 3.3 Definisi dan Operasional Variabel.....	25
Tabel 4.1 Hasil Uji Validitas.....	37
Tabel 4.2 Hasil Uji Reliabilitas.....	39
Tabel 4.3 Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Alternatif Pilihan Jawaban Terhadap Pernyataan Yang Berhubungan Dengan Penyajian Laporan Keuangan Daerah	41
Tabel 4.4 Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Alternatif Pilihan Jawaban Terhadap Pernyataan Yang Berhubungan Dengan Aksesibilitis Laporan Keuangan Daerah	42
Tabel 4.5 Distribusi Frekuensi Pegawai Berdasarkan Alternatif Pilihan Jawaban Terhadap Pernyataan Yang Berhubungan Dengan Transparansi dan Akuntabilitas	44
Tabel 5.1 Nilai Koefisien Regresi Masing-masing Variabel Independen.....	46
Tabel 5.2 Nilai Koefisien Korelasi (R) Dan Nilai Koefisien Determinasi (R^2)	48
Tabel 5.3 Ringkasan Pengujian Hipotesis.....	50

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Penelitian	20

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 Kuesioner Penelitian.....	56
Lampiran 2 Data Tabulasi.....	58
Lampiran 3 Frekuensi Berdasarkan Jawaban Responden	60
Lampiran 4 Output SPSS Correlations	63
Lampiran 5 Output SPSS Realibility	65
Lampiran 6 Output Spss Regresi Linier Berganda	68
Lampiran 7 Nilai F Tabel Pada Tingkat Keyakinan 95%	70
Lampiran 8 Nilai T Tabel Pada Tingkat Keyakinan 95%	71
Lampiran 9 Nilai-Nilai r Product Moment Pada Keyakinan 95%	72

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitis laporan keuangan daerah terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Kota Banda Aceh secara parsial maupun secara simultan. Populasi penelitian ini berjumlah 97 orang pegawai dan model penarikan sampel menggunakan metode *total sampling* sehingga diperoleh 97 orang pegawai sebagai sampel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitis laporan keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Kota Banda Aceh, hal ini membuktikan bahwa penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitis laporan keuangan daerah merupakan salah satu faktor yang berpengaruh pada transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, dengan hasil penelitian menunjukkan persentase 40,2% dan yang sisanya sebesar 59,8% dipengaruhi oleh faktor lain diluar variabel yang diteliti.

Hasil pengujian statistik uji F menunjukkan nilai F_{hitung} sebesar 31,658 nilai F_{tabel} pada tingkat keyakinan 95 persen menunjukkan angka sebesar 3,093. Karena nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($31,658 > 3,093$) dapat diartikan secara simultan kedua variabel independen yaitu penyajian laporan keuangan daerah (X_1) dan aksesibilitis laporan keuangan daerah (X_2) berpengaruh signifikan terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Kota Banda Aceh, sehingga hipotesis H_a diterima.

Hasil pengujian statistik uji t menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara penyajian laporan keuangan daerah (X_1) dan aksesibilitis laporan keuangan daerah (X_2) secara parsial terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Kota Banda Aceh. Dari perbandingan t_{hitung} dengan t_{tabel} diketahui bahwa keempat variable (X_1 dan X_2) adalah signifikan, karena $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($4,308$ dan $5,463 > 1,985$) sehingga pernyataan hipotesis kedua dapat diterima.

Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda dapat diketahui bahwa dari ketiga variabel yang diteliti, ternyata variabel aksesibilitis laporan keuangan daerah (X_2) yang mempunyai pengaruh paling dominan terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Kota Banda Aceh, dengan nilai koefesien sebesar 0,431, kemudian diikuti oleh variabel penyajian laporan keuangan daerah (X_1) dengan nilai sebesar 0,276.

Kata Kunci: Penyajian Laporan Keuangan Daerah, Aksesibilitis Laporan Keuangan Daerah Dan Transparansi Dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Daerah

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Distribusi penghasilan yang tidak merata merupakan problematika ekonomi yang kerap kali mencuat di negara-negara dunia ketiga, termasuk Indonesia. per kapita maupun produk domestik bruto yang angkanya meningkat setiap tahun, pada kenyataannya adalah sumbangan segelintir milyuner yang mampu menutupi porsi warga negara yang kekurangan. Bagi masyarakat muslim, Allah telah mensyariatkan salah satu penyelesaian yang jika dikelola dengan baik akan dapat menjadi intrumen pemerataan pendapatan, yaitu ZIS (*Zakat, Infak, dan Shadaqah*). Zakat bersifat wajib, sedangkan *infak* dan *shadaqah* merupakan pengeluaran harta secara suka rela.

Zakat merupakan salah satu dari lima produksi Islam. Hukumnya wajib bagi setiap muslim yang merdeka dan memiliki harta kekayaan sampai dengan jumlah tertentu yang telah mencapai *nisa*. Sebagaimana dinyatakan secara tegas dan jelas Al-Quran, as-Sunnah, dan konsensus (*ijma'*) para ulama. Dalam pandangan Islam, segala sesuatu mutlak milik Allah. Harta kekayaan yang dimiliki manusia hanyalah titipan yang bersifat sementara. Manusia hanya diberi kekuasaan dalam pengelolaan atau penggunaannya (Qardhawi, 2006:43).

Salah satu dari ketentuan Allah terkait dengan penggunaan harta adalah ketentuan tentang zakat. Secara sederhana, zakat merupakan transfer kepemilikan dari orang-orang memiliki kelebihan harta kepada orang-orang yang kekurangan harta (miskin). Dengan demikian, zakat tidak hanya berfungsi sebagai perwujudan ketaatan kepada Allah, tetapi

juga merupakan perwujudan kedulian sesama manusia. Dengan kata lain, berbeda dari kewajiban shalat yang lebih menekankan pada *hablumminallah*, zakat lebih bercorak sosial ekonomi yang bertujuan untuk mempererat *hablimminnas* yang juga berarti perwujudan konkret dari hubungan manusian yang positif. Dalam Al-Qurann perintah zakat sering kali datang bersamaan dengan perintah shalat. Hal ini menunjukkan bahwa kewajiban menjaga hubungan vertikal dengan Tuhan harus selalu dibarengi dengan ibadah yang bersifat horizontal untuk menyelaraskan hubungan dengan sesama manusia.

Dana zakat diambil dari harta umat mislim yang telah mencapai *nisab (muzakki)* untuk disalurkan kepada yang berhak menerimanya (*mustaqim*). Untuk mengakomodasi pengelolaan zakat tersebut, setiap pemerintahan Islam pelu mendirikan kantor, yayasan, atau lembaga khusus untuk mengurus pengumpulan serta pembagian zakat sesuai dengan perintah Allah Swt. Sejalan dengan kebutuhan ini, pengelolaan zakat di indonesia diatur dalam UU RI NO.38 tahun 1999 tentang pengelolan zakat dengan KMA (Keputusan Manteri Agama) No.581 tahun 1999 tentang Pelaksanaan UU RI NO. 38 tahun 1999. Dalam Bab III UU No. 38 tersebut dikemukakan bahwa ada dua jenis pengelolaan zakat, yaitu badan yang dibentuk pemerintah (pasal 6) dan lembaga yang dibentuk oleh masyarakat (pasal 7).

Organisasi pengelola zakat di Indonesia antara lain adalah BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) serat Baitul Mal. Zakat sebagai suatu kekuatan aktual umat Islam perlu dikelola dengan suatu sistem manajemen seperti yang digunakan dalam bidang perekonomian masyarakat lainnya.informasi menjadi inti dari kegiatan perzakatan. Agar informasi yang dibutuhkan tersedia, maka zakat harus diserahkan kepada pemengang pembukuan yang menulis semua transaksi perzakatan (Idris, 1997:253). Berdasarkan Qanun No. 10 Tahun 2007 Pasal 2, pengelola zakat diakeh dilaksanakan oleh Baitul Mal.

Organisasi pengelola zakat, dalam hal ini Baitul Mal Provinsi Aceh, adalah lembaga yang sensitif pada isu kepercayaan publik dalam pemghimpunan dan penyaluran dana zakat. Baitul Mal sebagai lembaga pemengang amanah umat Islam memiliki kewajiban untuk mencatat setiap sentoran dari pada *muzakki*, baik dari segi kuantitas maupun zakat itu sendiri. Baitul Mal juga berkewajiban mencatat kemana zakat itu disalurkan.Pada akhir periode, Baitul Mal wajib melaporkan pengelolaan zakat tersebut kepada masyarakat dalam bentuk laporan keuangan. Hal ini sekaligus untuk memenuhi tuntutan akan dalam bentuk laporan keuangan.Hal ini sekaligus untuk memenuhi tuntutan akan *good governance* yang meliputi unsur *transparency, responsibility, accountability, dan independency* (Utomo, 2007).

Akutansi merupakan alat mewujudkan *good governance* dengan kelima unsur tersebut. Akuntasi berfungsi untuk melaksanakan pencatatan dan pelaporan. Laporan merupakan media yang digunakan untuk menyajikan informasi yang diperlukan oleh pihak yang berkepentingan. Menurut PSAK (Pernyataan Standar Akutansi Keuangan) No. 1, tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyakut posisi keuangan, kinerja, serta laporan lainnya yang bermanfaat bagi pihak-pihak berkepentingan dalam pengambilan keputusan.

Untuk menghasilkan laporan yang berkualitas, organisasi pengelola zakat harus memiliki sistem akutansi atau standardisasi pelaporan agar masyarakat mengevaluasi dan memberikan umpan balik atas kinerja lembaga yang tercermin dari laporan keuangan yang disusun. Hasil dari beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa sebagian besar organisasi pengelolaan zakat yang ada di Indonesia ternyata belum memiliki dan menerapkan sistem keuangan yang seharusnya. Hal tersebut dikarenakan oleh ketidaktahuan pengelola. Persoalan ini menjadi tantangan yang harus dijawab dan

dicariakan solusinya, sehingga untuk mengatasi persoalan tersebut IAI merumuskan PSAK No. 109 tentang zakat dan Infak/Sedekah.

Berdasarkan PSAK 109, salah satu bentuk laporan keuangan yang harus disusun oleh organisasi pengelola zakat adalah laporan keuangan. Seperti organisasi nirlaba lainnya, informasi mengenai kinerja prganisasi pengelola zakat dapat diketahuhi dari laporan keuangannya. Namun demikian, terdapat perbeda antara laporan keuangan organisasi pengelola zakat dengan organisasi nirlaba pada umumnya. Saldo dana dari keuangan organisasi pengelola zakat, termasuk Baitul Mal, terdiri dari dana zakat, dana infak/sedekah, serta dana amil yang disajikan serta terpisah.

Secara umum, laporan keuangan atau yang lebih dikenal dengan neraca merupakan daftar aktiva, modal, dan kewajiban suatu perusahaan pada saat tertentu (Soemarso, 2004:55). Isi dari laporan keuangan merepresentasikan persamaan akutansi, yaitu $\text{aset} = \text{kewajiban} + \text{ekuitas}$. Aset yang berada disisi kiri sumber daya yang digunakan perusahaan dalam menjalankan usahanya sedangkan yang kanan menggambarkan sumber dana. Kewajiban adalah dana yang berasal dari pihat luar perusahaan, sementara ekuitas merupakan total dari pendanaan yang diinvestasikan oleh pemilik serta akumulasi laba yang tidak dibagikan kepada pemilik. Akun-akun yang dalam laporan keuangan disajikan berdasarkan tingkat likuiditasnya, sehingga ada pembagian aset menjadi aset lancar dan aset tetap serta kewajiban dibagi ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

Laporan keuangan perusahaan laba seperti yang telah dijelaskan tentunya berbeda dengan milik organisasi nerlaba seperti organisasi pengelola zakat. Pada laporan organisasi pengelola zakat, bagian ekuitas diisi oleh saldo dana sehingga laporannya adalah aset, kewajiban, dan saldo dana.

Pada dasarnya, penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Permadi (2010) yang, meneliti tentang penerapan *Exposure Draft* PSAK 109 pada ekuitas laporan keuangan lembaga zakat amil zakat. Ada beberapa hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu terletak pada waktu penelitian, tempat penelitian, serta variabel yang digunakan. Penelitian terdahulu dilakukan pada tahun 2010 pada saat PSAK 109 masih merupakan *exposure draft* yang baru dirumuskan saja, sedangkan penelitian ini dilakukan pada tahun 2014 ketika pengaturan tentang zakat dan infak/sedekah telah disahkan dalam PSAK 109, sehingga pengetahuan tentang PSAK ini dianggap telah lebih baik. Penelitian terdahulu merupakan studi kasus pada Yayasan Dana Sosial Al falah, sedangkan penelitian ini dilakukan pada Baitul Mal Aceh. Selanjutnya, penelitian Permadi (2010) dikhususkan pada ekuitas laporan keuangan, sedangkan penelitian ini mencakup laporan keuangan secara menyeluruh.

Penelitian Permadi (2010) menunjukkan hasil bahwa Dana Sosial Al Fatah masih mennggunakan PASK No. 45 sebagai dasar dalam penyusunan laporan keuangannya. Jika lembaga tersebut menggunakan ED PSAK No. 109 sebagai standar pelaporan bagi organisasi-organisasi pengelola zakat, dalam hal ini adalah Baitul Mal Aceh. Pemilihan laporan keuangan sebagai objek penelitian didasari oleh besarnya peran laporan ini dalam memberikan gambaran laporan umum pengelolaan dan kinerja atau orgaanisasi nirlaba. Sedangkan pemilihan Baitul Mal Aceh sebagai tempat penelitian didasarkan kepada peran Baitul Mal provinsi dalam mengelola zakat pada skala daerah tingkat I, sehingga tingkat penerapan PSAK diharapkan lebih baik dari Baitul Mal lainnya.

Berdasarkan uraian sebelumnya, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 Pada Laporan Keuangan Baitul Mal Aceh**”.

1.2. Rumusan Masalah

berdasarkan, maka yang menjadi perumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah penyusunan laporan keuangan Baitul Mal Aceh telah sesuai dengan PSAK 109.

1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah penyusunan laporan keuangan Baitul Mal Aceh telah sesuai dengan PSAK 109.

1.4. Kegunaan Hasil penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihat-pihak yang berkepentingan yaitu :

1. Kegunaan Praktis

1) Bagi penulis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang penyusunan laporan keuangan pada organisasi pengelola zakat khususnya pada Baitul Mal Aceh.

2) Bagi Baitul Mal Aceh dan organisasi pengelola zakat lainnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah informasi dan referensi tentang penyusunan laporan keuangan berdasarkan PSAK 109 sehingga dapat memperbaiki atau menyesuaikan jika masih terdapat hal-hal yang belum sesuai dengan PSAK 109 dalam pelaksanaannya.

2. Kegunaan Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu ekonomi sebagai sumber bacaan atau referensi khususnya yang berkaitan dengan penerapan PSAK 109 pada laporan keuangan lembaga-lembaga pengelola zakat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Transparansi

Transparansi adalah keterbukaan (Openness) pemerintahan dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Pemerintah berkewajiban memberikan informasi keuangan dan informasi lainnya yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang berkepentingan (Mardiasmo, 2000). Sedangkan menurut Adrianto (2007) transparansi adalah keterbukaan secara sungguh-sungguh, menyeluruh dan memberi tempat bagi partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam proses pengelolaan sumber daya publik.

Transparansi yaitu keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan sehingga dapat diketahui oleh masyarakat. Transparansi pada akhirnya akan menciptakan akuntabilitas antara pemerintah dengan rakyat (Mustopa Didjaja, 2003:261).

Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi yang diperlukan oleh masyarakat. Artinya, informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan (Mardiasmo, 2000). Transparansi mengisyaratkan bahwa laporan tahunan tidak hanya dibuat tetapi juga terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat, karena aktivitas pemerintahan dalam rangka menjalankan amanat rakyat.

Pembuatan laporan keuangan adalah suatu bentuk kebutuhan transparansi yang merupakan syarat pendukung adanya akuntabilitas. Transparansi informasi terutama informasi keuangan dan fiskal harus dilakukan dalam bentuk yang relevan dan mudah dipahami (Schiavio-Campoi and Tormasi, 1999 dan Budi Mulyana, 2006). Transparansi dapat dilakukan apabila ada kejelasan tugas dan kewenangan, ketersediaan informasi kepada publik, proses penganggaran yang terbuka, dan jaminan integritas dari pihak independen mengenai perkiraan fiskal, informasi dan penjabarannya (IMF, 1998)

Transparansi atau keterbukaan yang sangat diperlukan oleh publik adalah akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang harus didukung oleh sistem akuntansi pemerintah yang mampu menyediakan informasi untuk tujuan pertanggungjawaban (*Stewardship and Accountability*), mengontrol dan pengawasan/pengendalian manajemen pemerintah daerah (Nurkholis, 2000).

Dalam keuangan daerah, transparansi adalah keterbukaan dalam membuat kebijakan-kebijakan keuangan, sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh DPR/DPRD dan masyarakat. Transparansi pengelolaan keuangan pada akhirnya akan menciptakan *horizontal accountability* antara pemerintah dengan masyarakatnya, sehingga terciptanya pemerintahan yang bersih, efisien, akuntabel dan resposif terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat. Sedangkan pengendalian berarti penerimaan dan pengeluaran harus sering dimonitor dengan cara membandingkan antara yang dianggarkan dengan yang dicapai (Affandi, 2001).

2.2 Tujuan Transparansi

Menurut Nanang Haryono (2008), Adapun tujuan transparansi adalah untuk menciptakan;

- a. Informasi terbuka luas untuk masyarakat luas (sebagai data pemerintahan dan pembangunan ekonomi)
- b. Untuk membentuk aturan-aturan, regulasi dan kebijakan pemerintahan bagi publik secara jelas dan terbuka.
- c. Perlunya transparansi dalam pengelolaan pemerintahan lokal didasari oleh semangat otonomi daerah. Permasalahan yang sering muncul dalam transparansi publik pada hampir semua pemerintahan lokal diantaranya adalah masalah pengadaan barang untuk kepentingan publik.
- d. Begitu besar korupsi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah maka menuntut upaya untuk perbaikan dalam tata pemerintahan

2.3 Pengertian Akuntabilitas

Akuntabilitas mengandung arti pertanggungjawaban, baik oleh orang-orang maupun badan-badan yang terpilih, atas pilihan-pilihan dan tindakan-tindakannya. Akuntabilitas dapat pula diartikan sebagai bentuk kewajiban pertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (Mohammad dkk, 2004).

Menurut Mardiasmo (2000) bahwa akuntabilitas adalah sebuah kewajiban melaporkan dan bertanggungjawab atas keberhasilan ataupun

kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam pencapaian hasil yang telah ditetapkan sebelumnya, lewat media pertanggungjawaban yang dilakukan secara berkala. Sedangkan menurut Mahmudi (2010:23) akuntabilitas publik yaitu kewajiban agen (pemerintah) untuk mengelola sumber daya, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik kepada pemberi mandat (prinsipal).

Dimensi akuntabilitas publik meliputi akuntabilitas hukum dan kejujuran, akuntabilitas program, akuntabilitas kebijakan, dan akuntabilitas finansial. Akuntabilitas manajerial merupakan bagian terpenting untuk menciptakan kredibilitas manajemen pemerintah daerah. Jika masyarakat luas menilai pemerintah daerah tidak *accountable*, masyarakat dapat menuntut pergantian pemerintah, pergantian pejabat dan sebagainya. Rendahnya tingkat akuntabilitas juga meningkatkan risiko berinvestasi dan mengurangi kemampuan untuk berkoperasi serta melakukan efisiensi (Mardiasmo, 2006)

Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sasaran pertanggungjawaban ini adalah laporan keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku mencangkup penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang oleh instansi pemerintahan (LAN DAN BPKP, 2000). Instrumen utama dari akuntabilitas keuangan adalah anggaran pemerintah, data yang secara periodik dipublikasikan, laporan tahunan dan hasil investigasi dan laporan umum lainnya yang disiapkan oleh agen independen. Anggaran tahunan secara khusus mempunyai otoritas legal untuk pengeluaran

dana publik, sehingga proses penyelenggaraan secara keseluruhan menjadi relevan untuk manajemen fiskal dan untuk melaksanakan akuntabilitas keuangan dan pengendalian pada berbagai tingkat operasi (Mohammad, 2004).

2.4 Faktor-faktor Akuntabilitas

Lingkungan yang mempengaruhi akuntabilitas suatu entitas meliputi lingkungan internal dan eksternal yang merupakan faktor-faktor yang membentuk, memperkuat, atau memperlemah efektifitas pertanggungjawaban entitas atau wewenang dan tanggung jawab yang dilimpahkan kepadanya. Diantara faktor-faktor yang relevan dengan akuntabilitas instansi pemerintah antara lain meliputi:

- a. Falsafah dan konstitusi negara
- b. Tujuan sasaran pembangunan nasional
- c. Ilmu pengetahuan dan teknologi
- d. Ideologi politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan
- e. Ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur akuntabilitas serta penegakan hukum yang memadai
- f. Tingkat keterbukaan pengelolaan
- g. Sistem manajemen birokrasi
- h. Misi, tugas pokok dan fungsi, serta program pembangunan yang terkait
- i. Jangkauan pengendalian

Berbagai hal diperkirakan dapat menyebabkan mengapa akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan tersebut tidak berjalan dengan baik yaitu:

1. Populasi yang kurang peduli terhadap hak-haknya dan masalah-masalah sosial, cenderung memberikan toleransi yang tinggi terhadap sogok menyogok dan korupsi.
2. Pengawai dengan standar gaji yang kurang, memiliki kecenderungan untuk berusaha keras mencari penghasilan tambahan agar dapat menghidupi keluarganya.
3. Sikap hidup yang materialistik dan kosumerisme mendorong lack of accountability.
4. Terjadinya penurunan nilai-nilai moral, maka manusia akan semakin mudah melakukan hal-hal yang melanggar aturan.

5. Budaya yang berkembang dalam masyarakat dimana para pejabat pemerintah lebih mendahulukan pelayanan terhadap keluarga dari pada publik merupakan budaya yang tidak mendukung akuntabilitas.
6. Birokrasi yang terlalu besar dan berbelit-belit telah mengurangi pelaksanaan akuntabilitas
7. Buruknya sistem akuntansi merupakan salah satu faktor penyebab tidak dapat diperolehnya informasi yang handal dan dapat dipercaya untuk dipergunakan dalam penerapan akuntabilitas secara penuh.
8. Pemerintah yang melakukan control sangat ketat terhadap media massa, ekonomi dan pemberitaan, sehingga tidak leluasa untuk melakukan tindakan korektif atas paraktek-praktek penyelenggaraan pemerintah.
9. Sulit melakukan review terhadap program-program sector publik dan sulit menentukan siapa sebenarnya yang diwajibkan untuk mempertanggung jawabkannya.
10. Kualitas pejabat/petugas mencangkup besarnya jumlah capital dan material yang kurang menunjang efisiensi merupakan permasalahan dalam akuntabilitas.
11. Tidak tersedianya teknologi yang dapat mendukung kelancaran kerja.
12. Kelemahan hukum yang paling mendasar adalah dimana seseorang dianggap tidak bersalah sebelum dapat dibuktikan memang dia bersalah.
13. Instabilitas politik telah menciptakan rasa tidak aman dan ketidakpastian.

2.5 Laporan Keuangan Daerah

Menurut Mahmud M. Hanafi dan Adul Halim dalam buku Analisis Laporan Keuangan (2002:63) laporan keuangan adalah laporan yang diharapkan bisa memberi informasi mengenai perusahaan dan digabungkan dengan informasi lain, seperti industri, kondisi ekonomi, bisa memberikan gambaran yang lebih baik mengenai prospek dan risiko perusahaan.

Dalam PP 58 tahun 2005 pasal 1 disebutkan, keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

Laporan keuangan daerah merupakan informasi yang memuat data berbagai elemen struktur kekayaan dan struktur financial yang merupakan

pencerminan hasil aktivitas tertertu. Istilah “Laporan Keuangan Pemerintah Daerah” meliputi semua laporan dan berbagai penjelasan yang mengakui laporan tersebut akan diakui sebagai bagian dari laporan keuangan.

Bentuk dan unsur-unsur laporan keuangan daerah yaitu sebagai berikut:

- a. Neraca
Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai asset kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Yang unsurnya antara lain asset, kewajiban dan ekuitas dana.
- b. Laporan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Laporan realisasi penyajian ikhtisar sumber, alokasi pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah, yang menggambarkan perbandingan antar anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Komponen yang mencangkup secara langsung oleh laporan realisasi anggaran meliputi unsur pendapatan, belanja dan pembiayaan.
- c. Laporan Arus Kas
Laporan arus kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan kegiatan operasional, investasi, pembiayaan dan transaksi non anggaran menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir kas pemerintah pada periode tertentu.
- d. Catatan Atas Laporan Keuangan
Dalam laporan pertanggungjawaban keuangan daerah, terdapat tiga bentuk laporan keuangan daerah dan sistem akuntansi keuangan daerah yaitu laporan perhitungan APBD, laporan arus kas, dan neraca daerah.

2.6 Tujuan Penyajian Laporan Keuangan Daerah

Tujuan penyajian laporan keuangan daerah menurut Permendagri No.13 Tahun 2006 yaitu menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dan menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan :

- a. Menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran.
- b. Menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan.

- c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai.
- d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana pemerintah daerah mendanai seluruh kegiatannya, menyediakan informasi mengenai bagaimana pemerintah daerah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
- e. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi pemerintah daerah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.
- f. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan pemerintahan daerah, apakah mengalami kenaikan ataupun penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode anggaran.

Selanjutnya Mardiasmo (2002) menyatakan secara garis besar, tujuan umum penyajian laporan keuangan oleh pemerintah daerah sebagai berikut :

1. Untuk memberikan informasi yang berguna dalam pembuatan keputusan ekonomi, sosial, dan politik serta sebagai bukti pertanggungjawaban (*accountability*) dan pengelolaan (*stewardship*)
2. Untuk memberikan informasi yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasional.

Secara khusus, tujuan penyajian laporan keuangan oleh pemerintah daerah adalah :

1. Memberikan informasi keuangan untuk menentukan dan memprediksi aliran kas, saldo, neraca, dan kebutuhan sumber daya financial jangka pendek unit pemerintahan ;
2. Memberikan informasi keuangan untuk menentukan dan memprediksi kondisi ekonomi suatu unit pemerintahan dan perubahan-perubahan yang terjadi didalamnya;
3. Memberikan informasi keuangan untuk memonitor kinerja, kesesuaianya dengan peraturan perundang-undangan, kontrak yang disepakati, dan ketentuan lain yang disyaratkan;
4. Memberikan informasi untuk perencanaan dan penganggaran, serta untuk memprediksi pengaruh pemilikan dan pembelanjaan sumber daya ekonomi terhadap pencapaian tujuan operasional;
5. Memberikan informasi untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasional;
 - a. Untuk menentukan biaya program, fungsi dan aktivitas-aktivitas sehingga memudahkan analisis dan melakukan perbandingan dengan kriteria yang telah ditetapkan, membandingkan dengan

- kinerja periode-periode sebelumnya, dan dengan kinerja unit pemerintahan lain.
- b. Untuk mengevaluasi tingkat ekonomi dan efisiensi operasi, program, aktivitas, dan fungsi tertentu di unit pemerintah.
 - c. Untuk mengevaluasi hasil suatu program, aktivitas, dan fungsi serta efektivitas terhadap pencapaian tujuan dan target;
 - d. Untuk mengevaluasi tingkat pemerataan (Mardiasmo,2002).

2.7 Aksesibility Laporan Keuangan Daerah

Aksesibility (Aksesibilitas) menurut perseptif tata ruang adalah keadaan atau ketersedian hubungan dari suatu tempat ke tempat yang lain atau kemudahan seseorang atau kendaraaan untuk bergerak dari suatu tempat ketempat yang lain dengan aman, nyaman, serta kecepatan yang wajar (Rohman, 2009). Aksesibilitas dalam laporan keuangan sebagai kemudahan seseorang untuk memperoleh informasi laporan keuangan (Mulyana, 2006).

Bambang Sutantono (2004;1) menyatakan bahwa aksesibilitas adalah hak atas akses yang merupakan layanan kebutuhan melakukan perjalanan yang mendasar. Dalam hal ini aksesibilitas harus disediakan oleh pemerintah terlepas dari digunakannya modal transportasi yang disediakan tersebut oleh masyarakat.

Akuntabilitas yang efektif tergantung pada akses publik terhadap laporan keuangan yang dapat dibaca dan dipahami. Dalam demokrasi yang terbuka, akses ini diberikan oleh media, seperti surat kabar, majalah, radio, stasiun televisi, dan *website* (internet), dan forum yang memberikan perhatian langsung atau peranan yang mendorong akuntabilitas pemerintah terhadap masyarakat (*Shende dan Bennet, 2004*).

Menurut Yani (2009) pemerintah selaku perumus dan pelaksanaan kebijakan APBN berkewajiban untuk terbuka dan bertanggungjawab terhadap

seluruh hasil pelaksanaan pembangunan. Salah satu bentuk tanggungjawab tersebut diwujudkan dengan menyediakan informasi keuangan yang komprehensif kepada masyarakat luas termasuk informasi keuangan daerah. Dengan kemajuan teknologi yang pesat serta potensi pemanfaatannya secara luas, hal tersebut membuka peluang bagi berbagai pihak untuk mengakses, mengelola dan memperdayagunakan informasi secara cepat dan akurat untuk lebih mendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih, transparan dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif.

2.8 Penelitian Sebelumnya

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Supriyanti pada tahun 2000 meneliti tentang transparansi dan akuntabilitas kinerja sektor publik, dengan objek penelitian pada SKPD dikota Surabaya. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa adanya transparansi melalui laporan keuangan sebagai salah satu unsur akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Dengan begitu keikutsertaan dalam arti kontrol penyelenggaraan pemerintah semakin terasa. Begitu juga dengan DPR, rakyat dapat memberikan tekanan kepada pemerintah untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah.

Selanjutnya Daru anando pada tahun 2004 meneliti tentang laporan pertanggungjawaban pemerintah daerah sebagai perwujudan akuntabilitas publik. Penelitian dilakukan secara survey di daerah Yogyakarta, hasil penelitian menyimpulkan bahwa laporan pertanggungjawaban pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas publik pemerintah kabupaten/kota.

Kemudian Budi Mulyana, pada tahun 2006 meneliti tentang pengaruh penyajian neraca daerah dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Objek penelitian yang diambil adalah penggunaan eksternal laporan keuangan yaitu anggota DPRD dan masyarakat di kota Yogyakarta. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penyajian neraca daerah dan aksesibilitas laporan keuangan secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah.

Dan yang terakhir Marjuki Sagala pada tahun 2011 meneliti tentang pengaruh penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Samosir. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, baik secara simultan maupun parsial. Adapun penelitian sebelumnya dapat dilihat pada Tabel 2.1

Tabel 2.1
Penelitian Sebelumnya

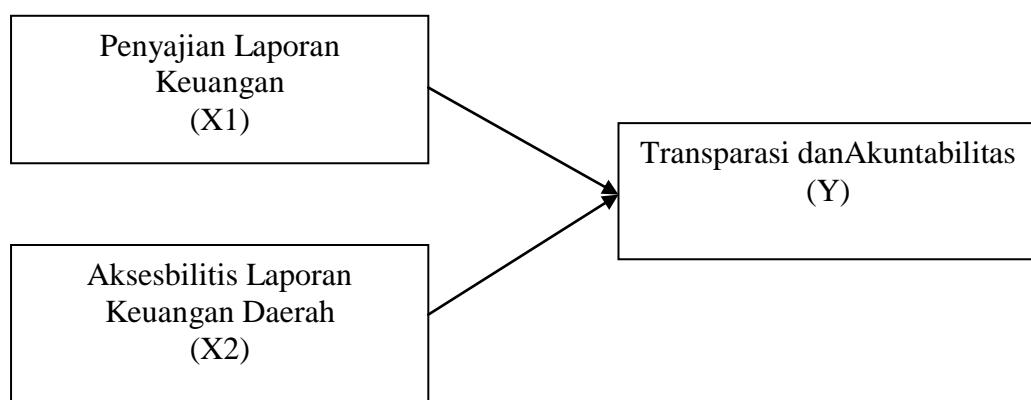
No	Penulis	Judul	Variabel	Model	Hasil	Persamaan	Perbedaan
1	Supriyanti (2000)	Transparansi dan akuntabilitas kinerja sektor publik di kota Surabaya	Transparansi, akuntabilitas, kinerja instansi pemerintahan	Regresi linier berganda	Transparansi tercipta melalui laporan keuangan sebagai salah satu unsur akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Persamaan Variabel yang diteliti transparansi dan akuntabilitas.	Objek penelitian dan waktu penelitian
2	Daro Anando (2004)	Laporan pertanggung jawaban pemerintah daerah sebagai perwujudan akuntabilitas publik daerah Yogyakarta	Laporan pertanggung jawaban, akuntabilitas publik	Regresi linier berganda	Laporan pertanggungjawaban keuangan daerah dan laporan pertanggungjawaban kinerja kepala daerah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas publik pemerintah kabupaten/kota	Menggunakan variabel dependen yang sama seperti akuntabilitas daerah.	Objek penelitian dan waktu penelitian
3	Mulyana (2006)	Pengaruh penyajian neraca daerah dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dikota Yogyakarta	Neraca daerah, aksesibilitas laporan keuangan, transparansi dan akuntabilitas	Regresi linier berganda	Penyajian neraca daerah dan aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah	Menggunakan variabel dependent yang sama seperti transparansi dan akuntabilitas keuangan.	Objek penelitian dan waktu penelitian

Lanjutan Tabel 2.1

4	Marjuki sagala (2011)	Pengaruh penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah kabupaten Samosir	Aksesibilitas laporan keuangan daerah, transparansi dan akuntabilitas	Regresi linier berganda	Penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah baik secara simultan maupun persial.	Menggunakan variabel independen yang sama seperti penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah.	Objek penelitian dan waktu penelitian
---	-----------------------	--	---	-------------------------	---	--	---------------------------------------

2.9 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan penelitian sebelumnya maka dapat digambarkan skema kerangka pemikiran dalam penelitian ini seperti terlihat pada Gambar 2.1



Gambar 2.1 : Kerangka Penelitian

2.10 Hipotesis Penelitian

Dari landasan teoritis dan penelitian terdahulu yang telah diuraikan sebelumnya, maka yang menjadi hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut;

H₁ : Diduga penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Kota Banda Aceh.

H₂ : Diduga aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Kota Banda Aceh.

H₃ : Diduga penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh secara simultan terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Kota Banda Aceh.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi dan Objek Penelitian

Dalam penelitian ini untuk mendapatkan data primer dan informasi yang benar dan dapat dipercaya, maka penulis mengadakan penelitian secara langsung pada lokasi penelitian yaitu pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPKAD) di Kantor Walikota Banda Aceh yang beralamat Jl. Balaikota Banda Aceh, Nanggroe Aceh Darussalam.

3.2 Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek dan subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan (sugiyono, 2006: 55). Populasi dan penelitian ini adalah DPKAD dilingkungan Pemerintah Daerah Kota Banda Aceh dengan responden pegawai PNS DPKAD. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 97 orang, jadi menurut Arikunto (2002:213) yang menyatakan “jika populasi kurang dari 100 maka lebih baik semua diambil sebagai sampel sehingga penelitian ini merupakan penelitian populasi (sensus). Populasi dan sensus penelitian seperti terlihat pada tabel 3.1

Tabel 3.1
Populasi dan Sampel

No	Golongan	Jumlah
1	Golongan IV/a - IV/d	4
2	Golongan III/a - III/d	63
3	Golongan II/a - II/d	30
	Total	97

Sumber: Dinas Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah, (2015).

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini akan dilakukan menggunakan Kuesioner terhadap para pengguna eksternal laporan keuangan pemerintah daerah. Pendistribusian kuesioner dilakukan dengan cara mengantar dan mengirim langsung kepada responden dan memberikan waktu untuk mengisinya. Jawaban kuesioner akan dikumpulkan kembali secara langsung oleh peneliti. Cara seperti ini ditempuh dengan pertimbangan untuk menghindari hilang atau tidak kembalinya kuesioner. Kuesioner dalam penelitian ini dirancang untuk penelitian kuantitatif. Oleh karena itu, bentuk pertanyaan dalam kuesioner bersifat *closed-ended question* agar memudahkan dalam pengukuran respon.

3.4 Skala Pengukuran

Skala yang digunakan dalam penelitian tentang pengaruh penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah menggunakan skala likert dengan lima rantang. Penggunaan skala ini untuk mengukur item-item pernyataan yang bersifat positif terhadap masalah yang diteliti maupun pertanyaan

yang bersifat negative. Alternatif penelitian dalam pengukuran item-item seperti lembar pada tabel 3.2

**Tabel 3.2
Skala Pengukuran**

No	Alternatif Jawaban	Nilai
1.	Sangat Tidak Setuju (STS)	1
2.	Tidak Setuju (TS)	2
3.	Kurang Setuju (KS)	3
4.	Setuju (S)	4
5.	Sangat Setuju (SS)	5

3.5 Definisi dan Operasional Variabel

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari variabel dependen (terikat) dan variabel independen (bebas). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (Y). Yang menjadi variabel independen dalam penelitian ini adalah penyajian laporan keuangan daerah (X1), dan aksesibilitas keuangan daerah (X2). Selanjutnya definisi operasional dan pengukuran variabel dapat dilihat dari tabel 3.3

Tabel 3.3
Definisi dan Operasional Variabel

Variabel Penelitian	Definisi Operasional	Pengukuran Variabel	Skala Penelitian
Variabel Dependent			
Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	<p>Transparansi adalah keterbukaan pemerintah untuk memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi.</p> <p>Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan, dan ketataan terhadap peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah diukur berdasarkan persepsi dari responden tentang pengelolaan keuangan daerah.</p> <p>Variabel ini diukur dengan skala likert yaitu pengukuran sikap dengan mengatakan setuju atau ketidaksetujuannya terhadap pernyataan yang diajukan dengan skor 5 (SS=sangat setuju), skor 4 (S=setuju), skor 3 (KS=kurang setuju), skor 2 (TS=tidak setuju), skor 1 (STS=sangat tidak setuju).</p>	Interval
Variabel Independent			
Penyajian Laporan Keuangan Daerah	Penyajian laporan keuangan daerah yang dilakukan oleh setiap SKPD pemerintah daerah	Penyajian Laporan Keuangan Daerah diukur berdasarkan persepsi responden tentang penyajian laporan keuangan daerah. Variabel ini diukur dengan skala likert yaitu mengukur sikap dengan mengatakan setuju atau ketidaksetujuannya terhadap pernyataan yang diajukan dengan skor 5 (SS=sangat setuju), skor 4 (S=setuju), skor 3 (KS=kurang setuju), skor 2 (TS=tidak setuju), skor 1 (STS=sangat tidak setuju).	Interval

Lanjutan Tabel 3.3

Aksesibilitis Laporan Keuangan Daerah	Aksesibilitis laporan keuangan adalah kemudahan seseorang untuk memperoleh informasi laporan keuangan.	Aksesibilitis Laporan Keuangan Daerah diukur berdasarkan persepsi dari responden mengenai akses publik terhadap laporan keuangan daerah. Variabel ini diukur dengan skala likert yaitu mengukur sikap dengan mengatakan setuju atau ketidaksetujuannya terhadap pernyataan yang diajukan dengan skor 5 (SS=sangat setuju), skor 4 (S=setuju), skor 3 (KS=kurang setuju), skor 2 (TS=tidak setuju), skor 1 (STS=sangat tidak setuju)	Interval
---------------------------------------	--	---	----------

3.6 Metode Analisa Data

Untuk mengetahui pengaruh variabel independen (penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah) terhadap transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah sebagai variabel dependen, peralatan statistik yang digunakan adalah regresi linier berganda. Untuk mengetahui pengaruh penyajian laporan keuangan dan aksesibility laporan keuangan daerah terhadap transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah digunakan persamaan sebagai berikut :

$$Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2 + e$$

Dimana:

Y : Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

X₁ : Penyajian laporan Keuangan Daerah

X₂ : Aksesibilitas laporan keuangan daerah

A : Konstanta

b₁b₂ : Koefisien Regresi

e : Kesalahan Residual

3.7 Uji Validitas dan Reabilitas

3.7.1 Uji Validitas

Uji validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat validitas atau kesahihan suatu instrumen, sebuah instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang diukurnya (Ancok, 1998:20). Faktor-faktor yang mengurangi validitas data antara lain kepatuhan responden mengikuti petunjuk pengisian kuesioner dan tidak tepatnya formulasi alat pengukur yaitu bentuk dan isi kuesioner (Hakim:1999 dalam Widyastuti:2000). Pengujian validasi dilakukan dengan menggunakan alat bantu program statistik, dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Jika r_{hitung} positif dan $r_{hitung} > r_{tabel}$ maka butir pertanyaan tersebut valid
- b. Jika r_{hitung} negatif atau $r_{hitung} < r_{tabel}$ maka butir pertanyaan tersebut tidak valid
- c. r_{hitung} dapat dilihat pada kolom *Corrected Item Total Correlation*

Analisi validasi dilakukan dengan memakai rumus teknik Korelasi Product Moment yang dikemukakan oleh person dengan bantuan program SPSS. Suatu item pengukuran dikatakan valid apabila nilai korelasi antara item yang satu dengan item yang lainnya tidak melebihi 0,59 (sekaran, 1992: 293).

3.7.2 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas menurut riyadi (2000) dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh hasil pengukuran tetap konsisten apabila dilakukan pengukuran dua kali atau lebih terhadap gejala yang sama dengan menggunakan alat ukur yang sama. Untuk melihat reliabilitas masing-masing instrumen yang digunakan,

peneliti menggunakan koefisien *cronbach alpha*. Suatu instrumen dikatakan reliable jika nilai *cronbach alpha* lebih besar dari 0,5 (Nunnally,1976:120).

Analisis reliabilitas dilakukan setelah analisi validitas dan hanya diliakukan terhadap item pengukuran yang valid. Peneliti menganalisis reliabilitas dengan *Cronbach Alpha* yang digunakan untuk mengukur keterandalan kuesioner. *Koefisien Cronbach Alpha* adalah suatu alat ukur yang banyak diminati dalam ilmu sosial dan merupakan suatu indeks yang menggambarkan betapa “dapat diandalkannya” skala yang dibuat. *Cronbach Alpha* menafsirkan korelasi antara skala yang dibuat dengan semua skala variabel yang ada. Pengukuran reliabilitas ini dianggap handal apabila koefisien alpha berada diatas 0,50 (Malhotra, 1996:305)

3.8 Uji Hipotesis

Setelah dilakukan pengukuran variabel, dilanjutkan dengan melakukan pengujian untuk setiap hipotesisnya.. Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan nilai koefisien b dengan Pengujian secara Simultan dan Pengujian secara Parsial.

3.8.1 Uji Simultan

Uji simultan (Keseluruhan; bersama-sama) pada konsep regresi linear adalah pengujian mengenai apakah model regresi yang didapat benar-benar dapat diterima. Hipotesis yang berlaku :

- a. Jika $\beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = 0$; maka H_0 diterima dan H_1 ditolak. Artinya variabel independen tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.

- b. Jika $\beta_1 \neq \beta_2 \neq \beta_3 \neq 0$, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Artinya variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.

3.8.2 Uji Parsial

Uji parsial digunakan untuk menguji apakah sebuah variabel independen (X_1, X_2) benar-benar memberikan kontribusi terhadap variabel dependen (Y). Dalam pengujian ini ingin diketahui apakah jika secara pisah, suatu variabel X masih memberikan kontribusi secara signifikan terhadap variabel Y. Hipotesis yang berlaku:

- a. Jika $\beta_1 = 0$: maka H_0 diterima dan H_1 ditolak. Artinya penyajian laporan keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Kota Banda Aceh.
- b. Jika $\beta_1 \neq 0$: maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Artinya penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Kota Banda Aceh.
- c. Jika $\beta_2 = 0$: maka H_0 diterima dan H_2 ditolak. Artinya aksesibilitas laporan keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Kota Banda Aceh
- d. Jika $\beta_2 \neq 0$: maka H_0 ditolak dan H_2 diterima. Artinya aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Kota Banda Aceh
- e. Jika $\beta_3 = 0$: Maka H_0 diterima dan H_3 ditolak. Artinya penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah tidak

berpengaruh terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

- f. Jika $\beta_3 \neq 0$: Maka H_0 ditolak dan H_3 diterima. Artinya penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Kota Banda Aceh.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Kota Banda Aceh

Berdasarkan naskah tua dan catatan-catatan sejarah, Kerajaan Aceh Darussalam dibangun diatas puing-puing kerajaan-kerajaan Hindu dan Budha seperti Kerajaan Indra Purba, Kerajaan Indra Purwa, Kerajaan Indra Patra dan Kerajaan Indra Pura Dari penemuan batu-batu nisan di Kampung Pande salah satu dari batu nisan tersebut terdapat batu nisan Sultan Firman Syah cucu dari Sultan Johan Syah, maka terungkaplah keterangan bahwa Banda Aceh adalah ibukota Kerajaan Aceh Darussalam yang dibangun pada hari Jumat, tanggal 1 Ramadhan 601 H (22 April 1205 M) yang dibangun oleh Sultan Johan Syah setelah berhasil menaklukkan Kerajaan Hindu/Budha Indra Purba dengan ibukotanya Bandar Lamuri.

Tentang Kota Lamuri ada yang mengatakan ia adalah Lam Urik sekarang terletak di Aceh Besar. Menurut Dr. N.A. Baloch dan Dr. Lance Castle yang dimaksud dengan Lamuri adalah Lamreh di Pelabuhan Malahayati (Krueng Raya sekarang). Sedangkan Istananya dibangun di tepi Kuala Naga (kemudian menjadi Krueng Aceh) di Kampung Pande sekarang ini dengan nama Kandang Aceh. Dan pada masa pemerintahan cucunya Sultan Alaidin Mahmud Syah, dibangun istana baru di seberang Kuala Naga (Krueng Aceh) dengan nama Kuta Dalam Darud Dunia (dalam kawasan Meligoe Aceh atau Pendopo Gubernur sekarang) dan beliau juga mendirikan Mesjid Djami Baiturrahman pada tahun 691 H.

Banda Aceh Darussalam sebagai ibukota Kerajaan Aceh Darussalam dan sekarang ini merupakan ibukota Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam telah berusia 808 tahun (tahun 2013 M) merupakan salah satu Kota Islam Tertua di Asia Tenggara. Seiring dengan perkembangan zaman Kerajaan Aceh Darussalam dalam perjalanan sejarahnya telah mengalami zaman gemilang dan pernah pula mengalami masa-masa suram yang menggentarkan. Adapun Masa gemilang Kerajaan Aceh Darussalam yaitu pada masa pemerintahan Sultan Alaidin Ali Mughayat Syah, Sultan Alaidin Abdul Qahhar (Al Qahhar), Sultan Alaidin Iskandar Muda Meukuta Alam dan Sultanah Tajul Alam Safiatuddin.

Sedangkan masa percobaan berat, pada masa Pemerintahan Ratu yaitu ketika golongan oposisi Kaum Wujudiyah menjadi kalap karena berusaha merebut kekuasaan menjadi gagal, maka mereka bertindak liar dengan membakar Kuta Dalam Darud Dunia, Mesjid DJami Baiturrahman dan bangunan-bangunan lainnya dalam wilayah kota. Kemudian Banda Aceh Darussalam menderita penghancuran pada waktu pecah Perang Saudara antara Sultan yang berkuasa dengan adik-adiknya, peristiwa ini dilukiskan oleh Teungku Dirukam dalam karya sastranya, Hikayat Pocut Muhammad.

Masa yang amat getir dalam sejarah Banda Aceh Darussalam pada saat terjadi Perang Dijalan Allah selama 70 tahun yang dilakukan oleh Sultan dan Rakyat Aceh sebagai jawaban atas ultimatum Kerajaan Belanda yang bertanggal 26 Maret 1837. Dan yang lebih luka lagi setelah Banda Aceh Darussalam menjadi puing dan diatas puing Kota Islam yang tertua di Nusantara ini Belanda mendirikan Kutaraja sebagai langkah awal Belanda dari usaha penghapusan dan

penghancuran kegembilangan Kerajaan Aceh Darussalam dan ibukotanya Banda Aceh Darussalam. Sejak itu ibukota Banda Aceh Darussalam diganti namanya oleh Gubernur Van Swieten ketika penyerangan Agresi ke-2 Belanda pada Kerajaan Aceh Darussalam tanggal 24 Januari 1874 setelah berhasil menduduki Istana/Keraton yang telah menjadi puing-puing dengan sebuah proklamasinya yang berbunyi :

Bahwa Kerajaan Belanda dan Banda Aceh dinamainya dengan Kutaraja, yang kemudian disahkan oleh Gubernur Jenderal di Batavia dengan beslit yang bertanggal 16 Maret 1874, semenjak saat itu resmilah Banda Aceh Darussalam dikebumikan dan diatas pusaranya ditegaskan Kutaraja sebagai lambang dari Kolonialisme.

Pergantian nama ini banyak terjadi pertentangan di kalangan para tentara Kolonial Belanda yang pernah bertugas dan mereka beranggapan bahwa Van Swieten hanya mencari muka pada Kerajaan Belanda karena telah berhasil menaklukkan para pejuang Aceh dan mereka meragukannya. Awal Penetapan Kota Banda Aceh Setelah 89 tahun nama Banda Aceh Darussalam telah dikubur dan Kutaraja dihidupkan, maka pada tahun 1963 Banda Aceh dihidupkan kembali, hal ini berdasarkan Keputusan Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah bertanggal 9 Mei 1963 No. Des 52/1/43-43. Dan semenjak tanggal tersebut resmilah Banda Aceh menjadi nama ibukota Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam bukan lagi Kutaraja hingga saat ini.

4.2 Visi Misi Kota Banda Aceh

Visi adalah sesuatu yang kita tuju, yang menentukan segala perbedaan mengenai apa yang akan kita lakukan secara jelas, yang mampu membangun

inspirasi dan motivasi, fokus dan menjadi pengungkit sekaligus pendorong untuk memberikan arah yang benar dan peluang bagi organisasi.

Visi Kota Banda Aceh adalah:
"Banda Aceh Model Kota Madani"

1. Penjelasan Visi

- 1) Makna yang terkandung dalam visi tersebut adalah terwujudnya Kota Banda Aceh sebagai bandar wisata islami Indonesia untuk kurun waktu 5 tahun Kedepan.
- 2) Wisata islami Indonesia dimaksudkan bidang kepariwisataan menjadi pengungkit dan pendorong (leverage) bagi tumbuh dan berkembangnya berbagai aktivitas masyarakat dan pengusaha yang bernilai ekonomis dan bisa menumbuhkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat dalam arti yang seluas-luasnya.
- 3) Wisata islami Indonesia dimaksud pula bahwa kegiatan kepariwisataan harus tetap dilandasi oleh nilai-nilai islami dan budaya keacehan sebagai identitas dan kultur masyarakat Kota Banda Aceh.
- 4) Wisata islami Indonesia juga bermakna bahwa siapapun yang berminat untuk memelihara atau menikmati jasa pariwisata islami Indonesia, maka keberadaannya ada di Kota Banda Aceh.

Upaya untuk mencapai visi dapat ditempuh dengan beberapa misi Kota Banda Aceh, yaitu:

- 1) Meningkatkan kualitas pengalaman agama menuju pelaksanaan syariat islam secara harifah.
- 2) Memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik
- 3) Memperkuat ekonomi kerakyatan
- 4) Menumbuhkan masyarakat yang berintelektualitas, sehat dan sejahtera, menguasai berbagai ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya.
- 5) Melanjutkan pembangunan infrastruktur pariwisata yang islami.
- 6) Meningkatkan partisipasi perempuan dalam ranah publik dan perlindungan anak.
- 7) Meningkatkan peran generasi muda sebagai kekuatan pembangunan Kota.

1. Penjelasan Misi

- 1) Melakukan berbagai upaya positif kontruktif dalam rangka memastikan terlaksananya syariat islam secara kaffah di Kota Banda Aceh.
- 2) Meningkatkan sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan.

- 3) Merevitalisasi Kota Banda Aceh menjadi pusat pariwisata yang mampu membangkitkan dan mendorong tumbuh dan berkembangnya aktivitas dan kegiatan masyarakat guna meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan.
- 4) Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur transportasi dan pemukiman rakyat, baik diperkotaan maupun pinggiran kota.

4.3 Struktur Organisasi

Kantor Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh atau dikenal dengan Kantor Walikota adalah seperangkat daerah yang membawahi 12 Dinas, yaitu Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja, Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil, Dinas Pendidikan, Pemuda & Olahraga, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, Komunikasi & Informatika, Dinas Kebersihan dan Keindahan Kota, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kelautan, Perikanan dan Pertanian, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi & UKM, Dinas Syariat Islam, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, dan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. 13 Badan dan Kantor Pelayanan Masyarakat yaitu Badan KESBANGPOL & PB, Sekretariat DPRK, Satpol PP dan Wilayatul Hisbah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BAPPEDA, Badan Pemberdayaan Masyarakat, Rumah Sakit Umum Daerah Meraxa, Kantor Pemberdayaan Perempuan & KB, Kantor Lingkungan Hidup, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, Kantor Perpustakaan & Arsip, dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu, serta 9 Pemerintah Kecamatan di Kota Banda Aceh yaitu Kecamatan Kuta Alam, Kecamatan Syiah Kuala, Kecamatan Baiturrahman, Kecamatan Meraxa, Kecamatan Jaya Baru, Kecamatan, Kecamatan Lueng Bata, Kecamatan Kutaraja, dan Kecamatan Ule Kareng, yang dipimpin oleh seorang Walikota dan bertanggung jawab terhadap Kepala Daerah (Gubernur). Untuk menyelenggarakan sejumlah urusan rumah tangganya tersebut,

Kantor Walikota telah membentuk struktur organisasi secara garis dan staf sesuai dengan Peraturan Daerah No 11 Tahun 1999. Secara garis besar struktur organisasi Kantor Walikota di Banda Aceh ini terdiri dari 17 Bagian meliputi:

1. Sekretariat Daerah
2. Asisten Keistimewaan, Ekonomi dan Pembangunan
3. Asisten Administrasi Umum
4. Asisten Pemerintah
5. Staf Ahli Bidang Keistimewaan, Kemasyarakatan dan SDM
6. Staf Ahli Bidang Pemerintahan
7. Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik
8. Staf Ahli Bidang Pembangunan
9. Bagian Organisasi
10. Bagian Adm Pembangunan
11. Bagian Keistimewaan
12. Bagian Humas
13. Bagian Adm Perekonomian
14. Bagian Hukum
15. Bagian Tata Pemerintahan
16. Bagian Umum
17. DPB

4.4 Hasil Pengujian Instrumen

4.4.1 Pengujian Validitas

Uji validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat validitas atau kesahihan suatu instrumen, sebuah instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang diukurnya. Faktor-faktor yang mengurangi validitas data antara lain kepatuhan responden mengikuti petunjuk pengisian kuesioner dan tidak tepatnya formulasi alat pengukur yaitu bentuk dan isi kuesioner. Untuk lebih jelasnya mengenai hasil pengujian validitas dapat dilihat pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1
Hasil Uji Validitas

No	Variabel	Butir	Nilai R _{hitung}	Nilai R _{tabel} (N=97)	Keterangan
1	Penyajian Laporan Keuangan Daerah (X ₁)	A1	0,613	0,198	Valid
		A2	0,653	0,198	Valid
		A3	0,526	0,198	Valid
		A4	0,400	0,198	Valid
		A5	0,558	0,198	Valid
2	Aksesibilitis Laporan Keuangan Daerah (X ₂)	B1	0,702	0,198	Valid
		B2	0,834	0,198	Valid
		B3	0,788	0,198	Valid
3	Transparansi Dan Akuntabilitas (Y)	C1	0,702	0,198	Valid
		C2	0,703	0,198	Valid
		C3	0,664	0,198	Valid

Sumber : Data Primer, 2015 (diolah)

Berdasarkan Tabel 4.1 sebelumnya, maka hasil pengujian vadilitas pada setiap variabel mempunyai nilai yang paling rendah, yaitu:

1. Variabel Penyajian Laporan Keuangan Daerah (X₁)

Hasil pengujian validitas untuk variabel penyajian laporan keuangan daerah yang terdiri dari 5 (lima) item pernyataan dilambangkan dengan kode item A1, A2, A3 hingga A5 menunjukkan r hitung terendah untuk variabel tersebut sebesar 0,400. Angka ini lebih besar bila dibandingkan dengan nilai r tabel (n=97) sebesar 0,198. Dengan demikian dapat diartikan seluruh item pernyataan yang berhubungan dengan variabel penyajian laporan keuangan daerah dinyatakan valid.

2. Variabel Aksesibilitis Laporan Keuangan Daerah (X₂)

Hasil pengujian validitas untuk variabel aksesibilitis laporan keuangan daerah yang terdiri dari 3 (tiga) item pernyataan dilambangkan dengan kode item B1, B2 dan B3, menunjukkan nilai r hitung terendah untuk

variabel tersebut menunjukkan angka sebesar 0,702. Angka ini juga lebih besar bila dibandingkan dengan nilai r tabel ($n=97$) sebesar 0,198, sehingga dapat diartikan bahwa seluruh item pernyataan yang berhubungan dengan variabel aksesibilitis laporan keuangan daerah juga dinyatakan valid.

3. Variabel Transparansi Dan Akuntabilitas (Y)

Hasil pengujian validitas variabel transparansi dan akuntabilitas yang terdiri dari 3 (tiga) item pernyataan dilambangkan dengan kode item C1, C2 dan C3 menunjukkan r hitung terendah untuk variabel tersebut sebesar 0,664. Angka ini lebih besar bila dibandingkan dengan nilai r tabel ($n=97$) sebesar 0,198. Dengan demikian dapat diartikan seluruh item pernyataan yang berhubungan dengan variabel transparansi dan akuntabilitas dinyatakan valid.

Berdasarkan uraian di atas jelaslah bahwa seluruh item pernyataan yang terdapat pada masing-masing variabel dependen yaitu transparansi dan akuntabilitas dan variabel independen penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitis laporan keuangan daerah dinyatakan valid, yang berarti kuesioner yang digunakan untuk pengumpulan data dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur.

4.4.2 Pengujian Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh hasil pengukuran tetap konsisten apabila dilakukan pengukuran dua kali atau lebih terhadap gejala yang sama dengan menggunakan alat ukur yang sama. Untuk

melihat reliabilitas masing-masing instrumen yang digunakan, peneliti menggunakan koefisien *cronbach alpha*. Suatu instrumen dikatakan reliable jika nilai *cronbach alpha* lebih besar dari 0,5. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 4.2.

**Tabel 4.2
Hasil Uji Reliabilitas**

No	Variabel	Item	Nilai Cronbach Alpha	Keterangan
1	Transparansi Dan Akuntabilitas (Y)	3	0,766	Handal
2	Penyajian Laporan Keuangan Daerah (X ₁)	5	0,705	Handal
3	Aksesibilitis Laporan Keuangan Daerah (X ₂)	3	0,814	Handal

Sumber : Data Primer, 2015 (diolah)

Berdasarkan hasil realibilitas dapat diketahui bahwa alpha untuk masing-masing variabel dapat dilihat dari beberapa variabel yaitu variabel penyajian laporan keuangan daerah (X₁) diperoleh nilai *Cronbach alpha* sebesar 0,705, variabel aksesibilitis laporan keuangan daerah (X₂) diperoleh nilai *Cronbach alpha* sebesar 0,814 dan transparansi dan akuntabilitas (Y) diperoleh nilai *Cronbach alpha* sebesar 0,766. Dengan demikian pengukuran reliabilitas terhadap variabel penelitian menunjukkan bahwa pengukuran kehandalan memenuhi kredibilitas *Cronbach Alpha* lebih besar dari 0,5.

4.5 Persepsi Responden Terhadap Indikator Penelitian

4.5.1 Persepsi Responden Terhadap Penyajian Laporan Keuangan Daerah

Penyajian laporan keuangan daerah yang dilakukan oleh setiap SKPD pemerintah daerah, variabel penyajian laporan keuangan daerah dijabarkan dalam 5 (lima) item pernyataan positif. Baik buruknya penyajian laporan keuangan

daerah dilihat dari alternatif pilihan tingkat kesetujuan yang mereka berikan pada masing-masing pernyataan.

Pernyataan pertama berkaitan dengan laporan Keuangan Daerah disajikan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan, yang menyatakan sangat setuju yaitu sebanyak 36 orang pegawai, yang menyatakan setuju sebanyak 45 orang pegawai, sebanyak 15 orang pegawai menyatakan kurang setuju, hanya 1 orang pegawai menyatakan tidak setuju dan tidak satu orangpun yang menyatakan sangat tidak setuju.

Pernyataan kedua berkaitan dengan SKPD mampu menyusun secara lengkap (Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan), yang menyatakan sangat setuju yaitu sebanyak 42 orang pegawai, yang menyatakan setuju sebanyak 48 orang pegawai, sebanyak 5 orang pegawai menyatakan kurang setuju, sebanyak 2 orang pegawai menyatakan tidak setuju dan tidak satu orangpun yang menyatakan sangat tidak setuju.

Penyataan ketiga berkaitan dengan SKPD mampu menyusun laporan keuangan secara lengkap pada tepat waktu. Sebanyak 20 orang pegawai menyatakan sangat setuju, sebanyak 67 orang pegawai menyatakan setuju, sebanyak 6 orang pegawai menyatakan kurang setuju, sebanyak 3 orang pegawai menyatakan tidak setuju dan hanya 1 orang pegawai yang menyatakan sangat tidak setuju.

Pernyataan keempat berkaitan dengan pengungkapan laporan keuangan disajikan pada setiap dinas Kota Banda Aceh. Sebanyak 33 orang pegawai menyatakan sangat setuju, sebanyak 63 orang pegawai menyatakan setuju, hanya

1 orang pegawai menyatakan kurang setuju dan tidak satu orangpun yang menyatakan tidak setuju dan sangat tidak setuju.

Untuk lebih jelasnya mengenai distribusi frekuensi pegawai berdasarkan pilihan jawaban terhadap pernyataan yang berhubungan dengan sistem penilaian kinerja dapat dilihat Tabel 4.3.

Tabel 4.3
Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Alternatif Pilihan Jawaban Terhadap Pernyataan Yang Berhubungan Dengan Penyajian Laporan Keuangan Daerah

Pernyataan Yang Berhubungan Dengan Penyajian Laporan Keuangan Daerah	Frekuensi Responden Berdasarkan Pilihan Jawaban					Rata -rata Skor
	Sangat Setuju	Setuju	Kurang Setuju	Tidak Setuju	Sangat Tidak Setuju	
1. Laporan Keuangan Daerah disajikan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan.	36	45	15	1	-	4,20
2. SKPD mampu menyusun secara lengkap (Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan).	42	48	5	2	-	4,34
3. SKPD mampu menyusun laporan keuangan secara lengkap pada tepat waktu.	20	67	3	1	-	4,05
4. Pengungkapan laporan keuangan disajikan pada setiap dinas Kota Banda Aceh.	33	63	1	-	-	4,33
5. Laporan keuangan yang disusun oleh SKPD telah dapat dijadikan sebagai tolak ukur dalam penyusunan anggaran tahun berikutnya.	30	62	3	2	-	4,24

Sumber: Data Primer (Diolah), 2015.

Pernyataan kelima berkaitan dengan laporan keuangan yang disusun oleh SKPD telah dapat dijadikan sebagai tolak ukur dalam penyusunan anggaran tahun

berikutnya. Sebanyak 30 orang pegawai menyatakan sangat setuju, sebanyak 62 orang pegawai menyatakan setuju, sebanyak 3 orang pegawai menyatakan kurang setuju, sebanyak 2 orang pegawai menyatakan tidak setuju dan tidak satu orangpun yang menyatakan sangat tidak setuju.

4.5.2 Persepsi Responden Terhadap Aksesibilitis Laporan Keuangan Daerah

Aksesibilitis laporan keuangan daerah adalah kemudahan seseorang untuk memperoleh informasi laporan keuangan. Dalam penelitian ini aksesibilitis laporan keuangan daerah dijabarkan dalam 3 (tiga) item pernyataan yaitu pada Tabel 4.4.

**Tabel 4.4
Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Alternatif Pilihan Jawaban
Terhadap Pernyataan Yang Berhubungan Dengan Aksesibilitis Laporan
Keuangan Daerah**

Pernyataan Yang Berhubungan Dengan Aksesibilitis Laporan Keuangan Daerah	Frekuensi Responden Berdasarkan Pilihan Jawaban					Rata-rata Skor
	Sangat Setuju	Setuju	Kurang Setuju	Tidak Setuju	Sangat Tidak Setuju	
1. Laporan Keuangan dipublikasikan secara terbuka melalui media massa.	39	53	3	2	-	4,33
2. Memberikan kemudahan dalam memperoleh informasi tentang laporan keuangan.	20	66	9	3	-	4,07
3. Masyarakat dapat mengakses laporan keuangan daerah melalui internet.	29	59	8	1	-	4,20

Sumber: Data Primer (Diolah), 2015.

Berdasarkan pada Tabel 4.4 diatas untuk peryataan pertama berkaitan dengan laporan keuangan dipublikasikan secara terbuka melalui media massa, yang menyatakan sangat setuju yaitu sebanyak 39 orang pegawai, yang

menyatakan setuju sebanyak 53 orang pegawai, sebanyak 3 orang pegawai menyatakan kurang setuju, sebanyak 2 orang pegawai menyatakan tidak setuju dan tidak satu orangpun yang menyatakan sangat tidak setuju.

Pernyataan kedua berkaitan dengan memberikan kemudahan dalam memperoleh informasi tentang laporan keuangan. Sebanyak 20 orang pegawai menyatakan sangat setuju, sebanyak 66 orang pegawai menyatakan setuju, sebanyak 9 orang pegawai menyatakan kurang setuju, sebanyak 3 orang pegawai menyatakan tidak setuju dan tidak satu orangpun yang menyatakan sangat tidak setuju.

Penyataan ketiga berkaitan dengan masyarakat dapat mengakses laporan keuangan daerah melalui internet. Sebanyak 29 orang pegawai menyatakan sangat setuju, sebanyak 59 orang pegawai menyatakan setuju, sebanyak 8 orang pegawai menyatakan kurang setuju, hanya 1 orang pegawai menyatakan tidak setuju dan tidak satu orangpun yang menyatakan sangat tidak setuju.

4.5.3 Persepsi Responden Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas

Transparansi adalah keterbukaan pemerintah untuk memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, variabel transparansi dan akuntabilitas dijabarkan dalam 3 (tiga) item pernyataan positif dilihat dari alternatif pilihan tingkat kesetujuan yang mereka berikan pada masing-masing pernyataan.

Untuk lebih jelasnya mengenai distribusi frekuensi pegawai berdasarkan pilihan jawaban terhadap pernyataan yang berhubungan dengan motivasi kerja dapat dilihat Tabel 4.5.

Tabel 4.5
Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Alternatif Pilihan Jawaban Terhadap Pernyataan Yang Berhubungan Dengan Transparansi Dan Akuntabilitas

Pernyataan Yang Berhubungan Dengan Transparansi Dan Akuntabilitas	Frekuensi Responden Berdasarkan Pilihan Jawaban					Rata-rata Skor
	Sangat Setuju	Setuju	Kurang Setuju	Tidak Setuju	Sangat Tidak Setuju	
1. Pengelolaan keuangan diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai.	31	55	8	3	-	4,18
2. Laporan keuangan disampaikan oleh Kepala Daerah kepada BPK untuk dilakukan pemeriksaan	39	51	5	2	-	4,31
3. Laporan keuangan SKPD direview oleh inspektorat sebelum diserahkan kepada BPK.	30	56	10	1	-	4,19

Sumber: Data Primer (Diolah), 2015.

Pernyataan pertama berkaitan dengan pengelolaan keuangan diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, yang menyatakan sangat setuju yaitu sebanyak 31 orang pegawai, yang menyatakan setuju sebanyak 55 orang pegawai, sebanyak 8 orang pegawai menyatakan kurang setuju, sebanyak 3 orang pegawai menyatakan tidak setuju dan tidak satu orangpun yang menyatakan sangat tidak setuju.

Pernyataan kedua berkaitan dengan laporan keuangan disampaikan oleh Kepala Daerah kepada BPK untuk dilakukan pemeriksaan. Sebanyak 39 orang

pegawai menyatakan sangat setuju, sebanyak 51 orang pegawai menyatakan setuju, sebanyak 5 orang pegawai menyatakan kurang setuju, sebanyak 2 orang pegawai menyatakan tidak setuju dan tidak satu orangpun yang menyatakan sangat tidak setuju.

Penyataan ketiga berkaitan dengan laporan keuangan SKPD direview oleh inspektorat sebelum diserahkan kepada BPK. Sebanyak 30 orang pegawai menyatakan sangat setuju, sebanyak 56 orang pegawai menyatakan setuju, sebanyak 10 orang pegawai menyatakan kurang setuju, hanya 1 orang pegawai menyatakan tidak setuju dan tidak satu orangpun yang menyatakan sangat tidak setuju.

BAB V

PEMBAHASAN

5.1 Analisis Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah Dan Aksesibilitis Laporan Keuangan Daerah Terhadap Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Banda Aceh

Sesuai dengan peralatan analisis data yang digunakan untuk mengetahui hubungan fungsional antara variabel yang diteliti dalam penelitian ini, yang dianalisis dengan regresi linier berganda. Untuk melihat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Kota Banda Aceh, maka perlu mengetahui pengaruh penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitis laporan keuangan daerah terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Kota Banda Aceh. Hal ini ditunjukkan oleh nilai koefisien regresi masing-masing variabel seperti terlihat pada Tabel 5.1.

Tabel 5.1
Nilai Koefisien Regresi
Masing-masing Variabel Independen
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients			t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	1.412	1.479		.955	.342		
Penyajian Laporan Keuangan Daerah	.276	.064	.354	4.308	.000	.943	1.061
Aksesibilitis Laporan Keuangan Daerah	.431	.079	.449	5.463	.000	.943	1.061

a. Dependent Variable: Transparansi Dan Akuntabilitas

Sumber: Data Primer (Diolah), 2015.

Berdasarkan Tabel 5.1 diatas maka persamaan regresi yang memperlihatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Kota Banda Aceh sebesar 1,412 pada satuan skala likert, dan variabel penyajian laporan

keuangan daerah berpengaruh terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Kota Banda Aceh sebesar 0,276, sedangkan aksesibilitis laporan keuangan daerah berpengaruh terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Kota Banda Aceh sebesar 0,431, maka dapat diformulasikan dalam persamaan berikut:

$$Y = 1,412 + 0,276X_1 + 0,431X_2 + e$$

Dari persamaan regresi diatas dapat diketahui bahwa hasil penelitian sebagai berikut :

5.1.1 Koefisien Regresi (β)

1. Konstanta sebesar 1,412 artinya jika penyajian laporan keuangan daerah (X_1) dan aksesibilitis laporan keuangan daerah (X_2) dianggap konstan, maka besarnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Kota Banda Aceh adalah sebesar 1,412 pada satuan skala likert atau transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Kota Banda Aceh cukup memuaskan.
2. Koefisien penyajian laporan keuangan daerah (X_1) sebesar 0,276, artinya bahwa setiap 100% perubahan dalam variabel penyajian laporan keuangan daerah, maka secara relatif akan mempengaruhi transparansi dan akuntabilitas sebesar 27,6%, dengan demikian semakin tinggi penyajian laporan keuangan daerah maka akan mempengaruhi transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Kota Banda Aceh.
3. Koefisien regresi aksesibilitis laporan keuangan daerah (X_2) sebesar 0,431, artinya bahwa setiap 100% perubahan dalam variabel aksesibilitis laporan

keuangan daerah, maka secara relatif akan mempengaruhi transparansi dan akuntabilitas sebesar 43,1%, dengan demikian semakin tinggi aksesibilitis laporan keuangan daerah maka akan semakin mempengaruhi transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Kota Banda Aceh.

Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda dapat diketahui bahwa dari ketiga variabel yang diteliti, ternyata variabel aksesibilitis laporan keuangan daerah (X_2) yang mempunyai pengaruh paling dominan terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Kota Banda Aceh, dengan nilai koefesien sebesar 0,431, kemudian diikuti oleh variabel penyajian laporan keuangan daerah (X_1) dengan nilai sebesar 0,276.

5.1.2 Koefisien Korelasi dan Determinasi

Untuk melihat hubungan dan pengaruh dari variabel pengaruh penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitis laporan keuangan daerah terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Kota Banda Aceh berdasarkan korelasi dan determinasi dapat dilihat pada Tabel 5.2.

Tabel 5.2
Nilai Koefisien Korelasi (R) dan Nilai Koefisien Determinasi (R^2)
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics					Durbin-Watson
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change	
1	.634 ^a	.402	.390	1.092	.402	31.658	2	94	.000	1.744

a. Predictors: (Constant), Aksesibilitis Laporan Keuangan Daerah, Penyajian Laporan Keuangan Daerah

b. Dependent Variable: Transparansi Dan Akuntabilitas

Sumber: Data Primer (Diolah), 2015.

1. Koefisien korelasi (r) sebesar 0,634 yang menunjukkan bahwa derajat hubungan (korelasi) antara variabel bebas dengan variabel terikat sebesar

63,4%, artinya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Kota Banda Aceh mempunyai hubungan yang cukup erat dan positif dengan penyajian laporan keuangan daerah (X_1) dan aksesibilitis laporan keuangan daerah (X_2).

2. Korelasi determinasi (r^2) sebesar 0,402, artinya sebesar 40,2% perubahan-perubahan dalam variabel terikat yaitu transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dapat dijelaskan oleh perubahan-perubahan dalam variabel penyajian laporan keuangan daerah (X_1) dan aksesibilitis laporan keuangan daerah (X_2). Sedangkan selebihnya yaitu sebesar 59,8% dijelaskan oleh variabel lain diluar dari pada penelitian ini.

5.2 Pembuktian Hipotesis

Hasil pengujian statistik uji F menunjukkan nilai F_{hitung} sebesar 31,658 nilai F_{tabel} pada tingkat keyakinan 95 persen menunjukkan angka sebesar 3,093. Karena nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($31,658 > 3,093$) dapat diartikan secara simultan kedua variabel independen yaitu penyajian laporan keuangan daerah (X_1) dan aksesibilitis laporan keuangan daerah (X_2) berpengaruh signifikan terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Kota Banda Aceh, sehingga hipotesis H_a diterima.

Selanjutnya untuk menguji signifikansi pengaruh masing-masing variabel independen terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah digunakan statistik uji t. Hasil pengujian statistik uji t menunjukkan nilai t_{hitung} untuk variabel penyajian laporan keuangan daerah (X_1) sebesar 4,308. Nilai t_{tabel} pada tingkat keyakinan 95 persen menunjukkan angka sebesar 1,985. Karena nilai

$t_{hitung} > t_{tabel}$ ($4,308 > 1,985$) dapat diartikan secara parsial penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Kota Banda Aceh, sehingga hipotesis Ha diterima.

Dan untuk variabel aksesibilitis laporan keuangan daerah (X_2) nilai t_{hitung} sebesar 5,463. Nilai t_{tabel} pada tingkat keyakinan 95 persen menunjukkan angka sebesar 1,985. Karena nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($5,463 > 1,985$) dapat diartikan secara parsial aksesibilitis laporan keuangan daerah (X_2) berpengaruh signifikan terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Kota Banda Aceh, sehingga hipotesis Ha diterima. Untuk lebih jelasnya mengenai hasil uji F dan uji t sebagai tolok ukur pengujian hipotesis dapat dilihat Tabel 5.3.

Tabel 5.3
Ringkasan Pengujian Hipotesis

Bentuk Pengujian	Nilai Statistik		Keterangan
	F_{hitung}	F_{tabel}	
Pengujian secara simultan	31,658	3,093	Kedua variabel berpengaruh signifikan (hipotesis Ha diterima, hipotesis Ho ditolak).
Pengujian secara parsial	t_{hitung}	t_{tabel}	
Penyajian Laporan Keuangan Daerah (X_1)	4,308	1,985	Penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh signifikan.
Aksesibilitis Laporan Keuangan Daerah (X_2)	5,463	1,985	Aksesibilitis laporan keuangan daerah berpengaruh signifikan.

Sumber: Data Primer (Diolah), 2015.

Berdasarkan Tabel 5.3 diatas jelaslah bahwa baik secara simultan maupun secara parsial penyajian laporan keuangan daerah (X_1) dan aksesibilitis laporan keuangan daerah (X_2) berpengaruh signifikan terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Kota Banda Aceh. Hal ini berarti bahwa penyajian laporan keuangan daerah (X_1) dan aksesibilitis laporan keuangan daerah (X_2) secara nyata dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Kota Banda Aceh.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitis laporan keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Kota Banda Aceh. Diantara kedua variabel yang diteliti, ternyata variabel aksesibilitis laporan keuangan daerah (X_2) mempunyai pengaruh paling dominan terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Kota Banda Aceh, dengan nilai koefesien sebesar 0,431, kemudian diikuti oleh variabel penyajian laporan keuangan daerah (X_1) dengan nilai sebesar 0,276.
2. Hasil pengujian statistik uji F menunjukkan nilai F_{hitung} sebesar 31,658 nilai F_{tabel} pada tingkat keyakinan 95 persen menunjukkan angka sebesar 3,093. Karena nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($31,658 > 3,093$) dapat diartikan secara simultan kedua variabel independen yaitu penyajian laporan keuangan daerah (X_1) dan aksesibilitis laporan keuangan daerah (X_2) berpengaruh signifikan terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Kota Banda Aceh, sehingga hipotesis H_a diterima.
3. Hasil pengujian statistik uji t menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara penyajian laporan keuangan daerah (X_1) dan aksesibilitis

laporan keuangan daerah (X_2) secara parsial terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Kota Banda Aceh. Dari perbandingan t_{hitung} dengan t_{tabel} diketahui bahwa keempat variable (X_1 dan X_2) adalah signifikan, karena $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($4,308$ dan $5,463 > 1,985$), sehingga pernyataan hipotesis H_a dapat diterima.

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian, beberapa saran yang diusulkan adalah:

1. Dengan diketahui pengaruh penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitis laporan keuangan daerah terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Kota Banda Aceh untuk menerapkan penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitis laporan keuangan daerah secara bertahap untuk melakukan perbaikan yang lebih baik dalam mengelola transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
2. Pengelolaan Laporan Keuangan Daerah di Kota Banda Aceh sebaiknya lebih memperhatikan penyajian laporan keuangan daerah karena dilihat dari hasil penelitian bahwa variabel penyajian laporan keuangan daerah lebih kecil pengaruhnya dibandingkan dengan aksesibilitis laporan keuangan daerah maka dari itu Pengelolaan Laporan Keuangan Daerah di Kota Banda Aceh lebih meningkatkan penyajian laporan keuangan daerah agar transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Kota Banda Aceh dapat meningkat.

3. Penelitian-penelitian yang lebih lanjut hendaknya menambah variabel lain yang dapat mempengaruhi transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah maka akan berpengaruh baik juga bagi perusahaan maupun instansi.

DAFTAR PUSTAKA

- Anondo, Daru. 2004. “**Laporan Pertanggung jawaban Pemerintah Daerah sebagai Bagian Perwujudan Akuntabilitas Publik (Studi Kasus di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)**”, Tesis Program Pasca Sarjana UGM Yogyakarta.
- Bastian, Indra. 2006. **Sistem Akuntansi Sektor Publik**, Edisi 2, Salemba Empat: Jakarta.
- Halim, Abdul. 2002. **Akuntansi Keuangan Daerah**, Penerbit Salemba Empat: Jakarta.
- Indriantoro, Nur dan Bambang supomo. 1999. **Metodologi Penelitian Bisnis**, BPFE: Yogyakarta.
- Ismail, Mohamad; Sjahruddin Rasul dan Haryono Umar, 2004, **Konsep dan Pengukuran Akuntabilitas**. Penerbit Universitas Trisakti: Jakarta.
- Koncoro, Mudrajad. 2003, **Metode Risert Untuk Bisnis dan Ekonomi**, Penerbit Erlangga: Jakarta.
- Mardiasmo, 2002, **Akuntansi Sektor Publik**. Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Mulyana, Budi, 2006. “**Pengaruh Penyajian Neraca Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah**”, Jurnal Akuntansi Pemerintahan Vol.2 No. 1, Mei 2006.
- Mursyidi, 2009. **Akuntansi Pemerintahan di Indonesia**, Refika Aditama. Bandung.
- Nordiawan, Deddi. 2010. **Akuntansi Sektor Publik**, Salemba Empat: Jakarta.
- Republik Indonesia. Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
- Republik Indonesia. Undang-Undang No. 33 Tahun 2002 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah.
- Republik Indonesia. Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
- Republik Indonesia. Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Republik Indonesia. Undang-Undang No. 59 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Republik Indonesia. Peraturan Pemerintahan No. 24 Tahun 2005 tentang Standart Akuntansi Pemerintahan.

Republik Indonesia. Peraturan pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan Daerah.

Sagala, Marjuki. 2011. **Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Empiris di Kabupaten Samosir)**, Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara.

LAN, 2000. **Akuntansi dan Good Governance**, Jakarta; Erlangga.

Situs Resmi Pemerintahan Daerah Kota Banda Aceh. Dpkad.Bandaacehkota.go.id

Lampiran 2 Catatan Atas Laporan Keuangan Bai

CATATAN ATAS

1 PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

- (1,1) Kas pada Bendahara
- Kas pada pem. Bendahara Pen
- Kas pada pem. Bendahara Pen
Jumlah Kas

- (1,2) Bank Rek Penerimaan Zakat
- BPD
- BSM
- BRI
- BNI
- BRI Syariah
- BANK MUAMALAT
- BPD Syariah
- BNI Syariah
- BPRS H. WAKILAH
- BPRS HAREUKAT
Jumlah

- (1,3) Bank Rek Penerimaan Infaq
- BPD
- BPD Syariah
Jumlah

- (1,4) Bank Rek Penyaluran
- BPD

- (1,5) Pinjaman Sekretariat BMA
Jumlah sebagaimana tersebut diatas untuk periode yang berakhir 31 Desember

- (1,6) Asset Tetap
Perincian terhadap perkiraan ini per 31

Keterangan

Tanah
Gedung dan Bangunan
Peralatan dan Mesin
Asse tetap Lainnya
Jumlah Asset

- (1,7) Dana Zakat
 Perincian terhadap jumlah saldo dana zakat
 - Sisa penerimaan zakat yang belum dibayarkan
 - Sisa zakat pada bend. Penyaluran
 Jumlah Dana
- (1,8) Dana Infak
 Perincian terhadap jumlah saldo dana infak
 - Infak pada rek. Penerimaan
 - Sisa Infak pada rek Penyaluran
 - Sisa Pinjaman Sekretariat BM.
 Jumlah Dana
- (1,9) Dana Lainnya
 - Saldo pada rek. Penerimaan Zakat
 - Saldo pada rek penyaluran
 - Saldo pada rek penerimaan Infak
 Jumlah Dana
- (1,10) Dana Terakumulasi dalam asset

tul Mal Aceh Tahun 2014

LAPORAN KEUANGAN

terimaan	Rp	-
yaluran	Rp	60.000,00
	Rp	60.000,00

Rp	1.346,18
Rp	1.352.370,89
Rp	1.504,28
Rp	475.500,83
Rp	500.770,90
Rp	735.317,00
Rp	770.500,09
Rp	137.890,03
Rp	593.570,00
Rp	100.500,93
Rp	10.689.271,13

Rp	43.893.073.518,00
Rp	55.437.084.397,00
Rp	99.330.157.915,00

Rp	39.155.037,39
----	----------------------

rupakan saldo pinjaman sekretariat Baitul Mal Aceh
yer 2014 berjumlah Rp **44.428.500**

Desember 2015 adalah sebagai berikut:

Saldo Akhir 2014

Rp 2.337.250.000,00
Rp 2.572.429.007,79
Rp 3.390.813.400,00
Rp -
Rp 8.300.492.407,79

akat adalah sebagai berikut:

elum di setorkan ke KASDA
ran yang belum disalurkan

Rp	63.893,00
Rp	-
Rp	63.893,00

ifaq adalah sebagai berikut:

n yang belum disalurkan
A

Rp	11.148,60
Rp	19.129,00
Rp	28.500,00
Rp	48.777,60

akat

Rp	23.110,00
Rp	41.870,71
Rp	47.130,70
Rp	12.110,71

fak

Rp	58.350,00
----	-----------

Lampiran 1**KUESIONER****I. DAFTAR PERTANYAAN**

Identitas Responden

Nama :
(boleh tidak diisi)

Jabatan :
(boleh tidak diisi)

Lama menjabat :

II. Pertanyaan Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Banda Aceh.

Bapak/Ibu dimohon untuk memberikan tanggapan yang sesuai atas pernyataan-pernyataan berikut dengan memilih skor yang tersedia dengan cara disilang (X). Jika menurut Bapak/Ibu tidak ada jawaban yang tepat, maka jawaban dapat diberikan pada pilihan yang paling mendekati. Skor jawaban adalah sebagai berikut :

- | | |
|--------|---------------------------|
| Skor 5 | Sangat Setuju (SS) |
| Skor 4 | Setuju (S) |
| Skor 3 | Kurang Setuju (KS) |
| Skor 2 | Tidak Setuju (TS) |
| Skor 1 | Sangat Tidak Setuju (STS) |

Penyajian Laporan Keuangan Daerah	SS	S	KS	TS	STS
1. Laporan Keuangan Daerah disajikan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan.					
2. SKPD mampu menyusun secara lengkap (Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan).					
3. SKPD mampu menyusun laporan keuangan secara lengkap pada tepat waktu.					
4. Pengungkapan laporan keuangan disajikan pada setiap dinas Kota Banda Aceh.					
5. Laporan keuangan yang disusun oleh SKPD telah dapat dijadikan sebagai tolak ukur dalam penyusunan anggaran tahun berikutnya.					
Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah	SS	S	KS	TS	STS
1. Laporan Keuangan dipublikasikan secara terbuka melalui media massa.					
2. Memberikan kemudahan dalam memperoleh informasi tentang laporan keuangan.					
3. Masyarakat dapat mengakses laporan keuangan daerah melalui internet.					
Transparansi dan Akuntabilitas	SS	S	KS	TS	STS
1. Pengelolaan keuangan diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai.					
2. Laporan keuangan disampaikan oleh Kepala Daerah kepada BPK untuk dilakukan pemeriksaan					
3. Laporan keuangan SKPD direview oleh inspektorat sebelum diserahkan kepada BPK.					

Lampiran 2

DATA TABULASI

No	PLKD					ALKD			TA			PLKD	ALKD	TA
	1	2	3	4	5	1	2	3	1	2	3			
1	5	5	4	4	4	4	4	4	4	5	5	22	12	14
2	5	5	4	4	4	4	4	4	4	5	5	22	12	14
3	5	5	4	4	4	4	4	4	4	5	5	22	12	14
4	4	2	2	4	4	4	4	4	2	4	4	16	12	10
5	5	5	4	4	4	5	5	5	4	5	5	22	15	14
6	5	5	4	4	4	5	5	5	4	5	5	22	15	14
7	5	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	21	15	15
8	5	5	4	5	4	5	5	5	5	5	5	23	15	15
9	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	25	15	15
10	5	5	4	5	4	5	5	5	4	5	5	23	15	14
11	5	5	4	4	4	5	4	4	5	4	5	22	13	14
12	5	4	4	5	5	4	5	3	4	4	4	23	12	12
13	5	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	21	15	15
14	5	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	21	15	15
15	4	4	4	4	4	5	5	5	4	4	5	20	15	13
16	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	25	12	12
17	5	5	4	4	4	5	4	4	4	4	4	22	13	12
18	5	5	4	4	4	4	4	4	5	4	4	22	13	13
19	5	5	4	4	5	4	4	5	5	4	5	23	13	14
20	5	5	5	5	4	4	4	4	5	5	4	24	12	14
21	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	20	12	12
22	5	5	4	4	5	3	3	4	3	4	5	23	10	12
23	4	5	4	5	4	5	4	4	5	5	4	22	13	14
24	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5	4	18	14	14
25	5	5	5	4	4	5	4	4	4	5	4	23	13	13
26	4	4	4	5	5	4	4	3	5	5	5	22	11	15
27	5	5	4	4	5	4	4	5	5	4	5	23	13	14
28	5	5	4	4	4	4	4	4	4	5	5	22	12	14
29	5	5	4	4	4	4	4	4	4	5	5	22	12	14
30	4	4	4	4	5	5	5	5	4	4	5	21	15	13
31	4	4	5	4	4	5	5	4	4	4	4	21	14	12
32	4	3	5	4	3	4	4	4	3	3	4	19	12	10
33	5	4	4	5	4	5	5	4	4	4	4	22	14	12
34	5	4	4	5	4	5	5	5	4	4	5	22	15	13
35	5	5	4	4	4	5	5	5	3	3	5	22	15	11
36	3	4	5	5	4	4	4	5	4	4	5	21	13	13
37	3	4	5	4	4	5	5	5	3	5	4	20	15	12
38	5	5	4	4	5	4	4	4	3	4	3	23	12	10
39	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	23	12	12
40	5	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	19	12	12
41	4	5	5	5	5	4	3	4	5	4	3	24	11	12
42	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	3	20	11	11
43	5	4	4	4	4	5	3	3	4	5	4	21	11	13
44	4	4	3	4	4	4	3	3	3	4	3	19	10	10

45	3	4	4	5	4	3	3	3	4	3	3	20	9	10
46	5	4	4	4	4	5	4	4	4	5	4	21	13	13
47	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	20	12	12
48	4	4	4	4	4	4	2	2	4	4	2	20	8	10
49	4	4	2	4	4	4	4	4	2	4	4	18	12	10
50	5	4	5	5	4	5	3	3	5	4	3	23	11	12
51	4	4	5	4	5	4	4	4	5	4	4	22	12	13
52	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	21	12	12
53	4	5	4	4	5	4	3	3	4	4	3	22	10	11
54	4	5	4	4	5	4	4	4	4	4	4	22	12	12
55	5	4	5	5	5	4	4	4	5	5	4	24	13	14
56	3	2	4	5	2	2	4	4	4	2	4	16	10	10
57	5	5	4	5	5	5	4	4	4	5	4	24	13	13
58	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	20	12	12
59	5	4	4	5	4	5	4	4	4	5	4	22	13	13
60	4	4	4	4	4	4	3	3	4	5	3	20	10	12
61	4	5	5	5	5	4	4	4	5	4	4	24	12	13
62	5	4	5	4	4	5	4	4	5	5	4	22	13	14
63	4	4	5	4	5	4	4	5	5	4	5	22	13	14
64	4	4	4	4	4	4	2	4	4	4	4	20	10	12
65	3	5	4	5	4	5	5	4	3	4	3	21	14	10
66	3	4	4	4	3	4	4	4	3	4	5	18	12	12
67	3	3	4	5	5	3	4	4	5	3	5	20	11	13
68	4	5	3	4	4	5	4	4	4	5	3	20	13	12
69	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	20	12	12
70	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	18	12	12
71	4	4	4	4	2	4	4	4	2	4	4	18	12	10
72	3	4	3	4	5	5	4	4	5	5	5	19	13	15
73	4	4	4	4	5	4	4	4	4	3	4	21	12	11
74	4	4	4	4	5	4	4	4	5	4	4	21	12	13
75	4	4	4	5	4	4	4	5	4	4	4	21	13	12
76	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	19	12	12
77	4	5	5	4	5	5	4	5	5	5	4	23	14	14
78	4	3	4	5	4	2	4	5	4	2	4	20	11	10
79	4	5	4	5	4	5	4	5	4	5	4	22	14	13
80	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	20	12	12
81	4	5	4	4	4	5	4	4	4	5	4	21	13	13
82	3	5	2	3	4	4	4	4	4	4	4	17	12	12
83	4	4	4	5	5	4	4	5	5	4	4	22	13	13
84	4	5	4	5	5	5	4	4	5	5	5	23	13	15
85	3	4	5	4	5	4	5	4	5	4	4	21	13	13
86	4	5	4	5	5	5	4	4	5	5	4	23	13	14
87	3	4	5	4	5	4	4	4	5	4	4	21	12	13
88	4	4	5	5	4	4	5	4	4	4	4	22	13	12
89	4	4	4	4	5	4	4	4	5	4	4	21	12	13
90	4	5	4	4	5	4	4	5	5	4	4	22	13	13
91	3	5	4	5	4	5	4	4	4	5	5	21	13	14
92	4	5	3	5	4	5	4	5	4	5	5	21	14	14
92	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	19	12	12
94	4	5	1	5	5	5	4	5	5	5	4	20	14	14

95	4	5	3	4	4	5	4	5	4	5	4	20	14	13
96	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	19	12	12
97	4	5	4	5	4	5	4	5	4	5	4	22	14	13

Lampiran 3 Frekuensi Berdasarkan Jawaban Responden

⊕ Penyajian Laporan Keuangan Daerah (X₁)

Statistics

		PLKD1	PLKD2	PLKD3	PLKD4	PLKD5
N	Valid	97	97	97	97	97
	Missing	0	0	0	0	0
Mean		4.20	4.34	4.05	4.33	4.24
Median		4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
Std. Deviation		.731	.675	.698	.494	.609
Minimum		2	2	1	3	2
Maximum		5	5	5	5	5
Sum		407	421	393	420	411

Frequensi Table

PLKD1

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2	1	1.0	1.0
	3	15	15.5	16.5
	4	45	46.4	62.9
	5	36	37.1	100.0
Total	97	100.0	100.0	

PLKD2

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2	2	2.1	2.1
	3	5	5.2	7.2
	4	48	49.5	56.7
	5	42	43.3	100.0
Total	97	100.0	100.0	

PLKD3

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1	1	1.0	1.0
	2	3	3.1	4.1
	3	6	6.2	10.3
	4	67	69.1	79.4
	5	20	20.6	100.0
Total	97	100.0	100.0	

PLKD4

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 3	1	1.0	1.0	1.0
4	63	64.9	64.9	66.0
5	33	34.0	34.0	100.0
Total	97	100.0	100.0	

PLKD5

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 2	2	2.1	2.1	2.1
3	3	3.1	3.1	5.2
4	62	63.9	63.9	69.1
5	30	30.9	30.9	100.0
Total	97	100.0	100.0	

▲ Aksesibilitis Laporan Keuangan Daerah (X_2)**Statistics**

		ALKD1	ALKD2	ALKD3
N	Valid	97	97	97
	Missing	0	0	0
Mean		4.33	4.07	4.20
Median		4.00	4.00	4.00
Std. Deviation		.641	.617	.623
Minimum		2	2	2
Maximum		5	5	5
Sum		420	395	407

Frequensi Table**ALKD1**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 2	2	2.1	2.1	2.1
3	3	3.1	3.1	5.2
4	53	54.6	54.6	59.8
5	39	40.2	40.2	100.0
Total	97	100.0	100.0	

ALKD2

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 2	2	2.1	2.1	2.1
3	9	9.3	9.3	11.3
4	66	68.0	68.0	79.4
5	20	20.6	20.6	100.0
Total	97	100.0	100.0	

ALKD3

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 2	1	1.0	1.0	1.0
3	8	8.2	8.2	9.3
4	59	60.8	60.8	70.1
5	29	29.9	29.9	100.0
Total	97	100.0	100.0	

Transparansi dan Akuntabilitas (Y)**Statistics**

		TA1	TA2	TA3
N	Valid	97	97	97
	Missing	0	0	0
Mean		4.18	4.31	4.19
Median		4.00	4.00	4.00
Std. Deviation		.707	.667	.651
Minimum		2	2	2
Maximum		5	5	5
Sum		405	418	406

Frequensi Table**TA1**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 2	3	3.1	3.1	3.1
3	8	8.2	8.2	11.3
4	55	56.7	56.7	68.0
5	31	32.0	32.0	100.0
Total	97	100.0	100.0	

TA2

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2	2	2.1	2.1
	3	5	5.2	5.2
	4	51	52.6	52.6
	5	39	40.2	40.2
Total	97	100.0	100.0	100.0

TA3

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2	1	1.0	1.0
	3	10	10.3	10.3
	4	56	57.7	57.7
	5	30	30.9	30.9
Total	97	100.0	100.0	100.0

Lampiran 4 Output SPSS Correlations

✿ Penyajian Laporan Keuangan Daerah (X_1) Descriptive Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
PLKD1	4.20	.731	97
PLKD2	4.34	.675	97
PLKD3	4.05	.698	97
PLKD4	4.33	.494	97
PLKD5	4.24	.609	97
Penyajian Laporan Keuangan Daerah	21.15	1.793	97

Correlations

		PLKD1	PLKD2	PLKD3	PLKD4	PLKD5	Penyajian Laporan Keuangan Daerah
PLKD1	Pearson Correlation	1	.349**	.123	.021	.058	.613**
	Sig. (2-tailed)		.000	.230	.837	.570	.000
	N	97	97	97	97	97	97
PLKD2	Pearson Correlation	.349**	1	.029	.035	.334**	.653**
	Sig. (2-tailed)	.000		.780	.735	.001	.000
	N	97	97	97	97	97	97

PLKD3	Pearson Correlation	.123	.029	1	.162	.094	.526**
	Sig. (2-tailed)	.230	.780		.114	.362	.000
	N	97	97	97	97	97	97
PLKD4	Pearson Correlation	.021	.035	.162	1	.118	.400**
	Sig. (2-tailed)	.837	.735	.114		.249	.000
	N	97	97	97	97	97	97
PLKD5	Pearson Correlation	.058	.334**	.094	.118	1	.558**
	Sig. (2-tailed)	.570	.001	.362	.249		.000
	N	97	97	97	97	97	97
Penyajian Laporan Keuangan Daerah	Pearson Correlation	.613**	.653**	.526**	.400**	.558**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	97	97	97	97	97	97

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

✳️ Aksesibilitis Laporan Keuangan Daerah (X_2)

Descriptive Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
ALKD1	4.33	.641	97
ALKD2	4.07	.617	97
ALKD3	4.20	.623	97
Aksesibilitis Laporan Keuangan Daerah	12.60	1.455	97

Correlations

		ALKD1	ALKD2	ALKD3	Aksesibilitis Laporan Keuangan Daerah
ALKD1	Pearson Correlation	1	.361**	.254*	.702**
	Sig. (2-tailed)		.000	.012	.000
	N	97	97	97	97
ALKD2	Pearson Correlation	.361**	1	.586**	.834**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000
	N	97	97	97	97
ALKD3	Pearson Correlation	.254*	.586**	1	.788**
	Sig. (2-tailed)	.012	.000		.000
	N	97	97	97	97
Aksesibilitis Laporan Keuangan Daerah	Pearson Correlation	.702**	.834**	.788**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	
	N	97	97	97	97

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

 **Transparansi dan Akuntabilitas (Y)**

Descriptive Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
TA1	4.18	.707	97
TA2	4.31	.667	97
TA3	4.19	.651	97
Transparansi Dan Akuntabilitas	12.67	1.397	97

Correlations

		TA1	TA2	TA3	Transparansi Dan Akuntabilitas
TA1	Pearson Correlation	1	.237*	.178	.702**
	Sig. (2-tailed)		.019	.082	.000
	N	97	97	97	97
TA2	Pearson Correlation	.237*	1	.226*	.703***
	Sig. (2-tailed)	.019		.026	.000
	N	97	97	97	97
TA3	Pearson Correlation	.178	.226*	1	.664**
	Sig. (2-tailed)	.082	.026		.000
	N	97	97	97	97
Transparansi Dan Akuntabilitas	Pearson Correlation	.702**	.703**	.664**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	
	N	97	97	97	97

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Lampiran 5 Output SPSS Reliability

 **Penyajian Laporan Keuangan Daerah (X₁)**

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	97	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	97	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.705	.691	6

Item Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
PLKD1	4.20	.731	97
PLKD2	4.34	.675	97
PLKD3	4.05	.698	97
PLKD4	4.33	.494	97
PLKD5	4.24	.609	97
Penyajian Laporan Keuangan Daerah	21.15	1.793	97

Summary Item Statistics

	Mean	Minimum	Maximum	Range	Maximum / Minimum	Variance	N of Items
Item Means	7.052	4.052	21.155	17.103	5.221	47.746	6

 **Aksesibilitis Laporan Keuangan Daerah (X₂)****Case Processing Summary**

		N	%
Cases	Valid	97	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	97	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.814	.851	4

Item Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
ALKD1	4.33	.641	97
ALKD2	4.07	.617	97
ALKD3	4.20	.623	97
Aksesibilitis Laporan Keuangan Daerah	12.60	1.455	97

Summary Item Statistics

	Mean	Minimum	Maximum	Range	Maximum / Minimum	Variance	N of Items
Item Means	6.299	4.072	12.598	8.526	3.094	17.645	4

Transparansi dan Akuntabilitas (Y)

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	97	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	97	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.766	.767	4

Item Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
TA1	4.18	.707	97
TA2	4.31	.667	97
TA3	4.19	.651	97
Transparansi Dan Akuntabilitas	12.67	1.397	97

Summary Item Statistics

	Mean	Minimum	Maximum	Range	Maximum / Minimum	Variance	N of Items
Item Means	6.335	4.175	12.670	8.495	3.035	17.841	4

Lampiran 6 Output SPSS Regresi Linier Berganda

Variables Entered/Removed^b

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Aksesibilitis Laporan Keuangan Daerah, Penyajian Laporan Keuangan Daerah ^a		. Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: Transparansi Dan Akuntabilitas

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics					Durbin-Watson
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change	
1	.634 ^a	.402	.390	1.092	.402	31.658	2	94	.000	1.744

a. Predictors: (Constant), Aksesibilitis Laporan Keuangan Daerah, Penyajian Laporan Keuangan Daerah

b. Dependent Variable: Transparansi Dan Akuntabilitas

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	75.442	2	37.721	31.658	.000 ^a
	Residual	112.001	94	1.192		
	Total	187.443	96			

a. Predictors: (Constant), Aksesibilitis Laporan Keuangan Daerah, Penyajian Laporan Keuangan Daerah

b. Dependent Variable: Transparansi Dan Akuntabilitas

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error				Tolerance	VIF
1	(Constant)	1.412	1.479		.955	.342		
	Penyajian Laporan Keuangan Daerah	.276	.064	.354	4.308	.000	.943	1.061
	Aksesibilitis Laporan Keuangan Daerah	.431	.079	.449	5.463	.000	.943	1.061

a. Dependent Variable: Transparansi Dan Akuntabilitas

Coefficient Correlations^a

Model		Aksesibilitis Laporan Keuangan Daerah	Penyajian Laporan Keuangan Daerah
1	Correlations	Aksesibilitis Laporan Keuangan Daerah	1.000
		Penyajian Laporan Keuangan Daerah	-.240
	Covariances	Aksesibilitis Laporan Keuangan Daerah	.006
		Penyajian Laporan Keuangan Daerah	-.001

a. Dependent Variable: Transparansi Dan Akuntabilitas

Collinearity Diagnostics^a

Model	Dimensi on	Eigenvalue	Condition Index	Variance Proportions		
				(Constant)	Penyajian Laporan Keuangan Daerah	Aksesibilitis Laporan Keuangan Daerah
1	1	2.988	1.000	.00	.00	.00
	2	.008	18.806	.06	.20	.95
	3	.003	29.488	.94	.80	.05

a. Dependent Variable: Transparansi Dan Akuntabilitas

Residuals Statistics^a

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	10.13	14.76	12.67	.886	97
Residual	-3.231	2.785	.000	1.080	97
Std. Predicted Value	-2.865	2.363	.000	1.000	97
Std. Residual	-2.960	2.552	.000	.990	97

a. Dependent Variable: Transparansi Dan Akuntabilitas

Lampiran 7

Nilai F Tabel Pada Tingkat Keyakinan 95%

DF 2	DF 1					
	1	2	3	4	5	6
1	161,446	199,499	215,707	224,583	230,160	233,988
2	18,513	19,000	19,164	19,247	19,296	19,329
3	10,128	9,552	9,277	9,117	9,013	8,941
4	7,709	6,944	6,591	6,388	6,256	6,163
5	6,608	5,786	5,409	5,192	5,050	4,950
6	5,987	5,143	4,757	4,534	4,387	4,284
7	5,591	4,737	4,347	4,120	3,972	3,866
8	5,318	4,459	4,066	3,838	3,688	3,581
9	5,117	4,256	3,863	3,633	3,482	3,374
10	4,965	4,103	3,708	3,478	3,326	3,217
11	4,844	3,982	3,587	3,357	3,204	3,095
12	4,747	3,885	3,490	3,259	3,106	2,996
13	4,667	3,806	3,411	3,179	3,025	2,915
14	4,600	3,739	3,344	3,112	2,958	2,848
15	4,543	3,682	3,287	3,056	2,901	2,790
16	4,494	3,634	3,239	3,007	2,852	2,741
17	4,451	3,592	3,197	2,965	2,810	2,699
18	4,414	3,555	3,160	2,928	2,773	2,661
19	4,381	3,522	3,127	2,895	2,740	2,628
20	4,351	3,493	3,098	2,866	2,711	2,599
21	4,325	3,467	3,072	2,840	2,685	2,573
22	4,301	3,443	3,049	2,817	2,661	2,549
23	4,279	3,422	3,028	2,796	2,640	2,528
24	4,260	3,403	3,009	2,776	2,621	2,508
25	4,242	3,385	2,991	2,759	2,603	2,490
26	4,225	3,369	2,975	2,743	2,587	2,474
27	4,210	3,354	2,960	2,728	2,572	2,459
28	4,196	3,340	2,947	2,714	2,558	2,445
29	4,183	3,328	2,934	2,701	2,545	2,432
30	4,171	3,316	2,922	2,690	2,534	2,421
31	4,160	3,305	2,911	2,679	2,523	2,409
32	4,149	3,295	2,901	2,668	2,512	2,399
33	4,139	3,285	2,892	2,659	2,503	2,389
34	4,130	3,276	2,883	2,650	2,494	2,380
35	4,121	3,267	2,874	2,641	2,485	2,372
36	4,113	3,259	2,866	2,634	2,477	2,364
37	4,105	3,252	2,859	2,626	2,470	2,356
38	4,098	3,245	2,852	2,619	2,463	2,349
39	4,091	3,238	2,845	2,612	2,456	2,342
40	4,085	3,232	2,839	2,606	2,449	2,336
41	4,079	3,226	2,833	2,600	2,443	2,330
42	4,073	3,220	2,827	2,594	2,438	2,324
43	4,067	3,214	2,822	2,589	2,432	2,319
44	4,062	3,209	2,816	2,584	2,427	2,313
45	4,057	3,204	2,812	2,579	2,422	2,308
46	4,052	3,200	2,807	2,574	2,417	2,304
47	4,047	3,195	2,802	2,570	2,413	2,299
48	4,043	3,191	2,798	2,565	2,409	2,295
49	4,038	3,187	2,794	2,561	2,404	2,290
50	4,034	3,183	2,790	2,557	2,400	2,286
51	4,034	3,183	2,790	2,557	2,400	2,286
52	4,030	3,179	2,786	2,553	2,397	2,283
53	4,027	3,175	2,783	2,550	2,393	2,279
54	4,023	3,172	2,779	2,546	2,389	2,275
55	4,020	3,168	2,776	2,543	2,386	2,272
56	4,016	3,165	2,773	2,540	2,383	2,269
57	4,013	3,162	2,769	2,537	2,380	2,266
58	4,010	3,159	2,766	2,534	2,377	2,263
59	4,007	3,156	2,764	2,531	2,374	2,260
60	4,004	3,153	2,761	2,528	2,371	2,257
61	4,001	3,150	2,758	2,525	2,368	2,254
62	3,998	3,148	2,755	2,523	2,366	2,251
63	3,996	3,145	2,753	2,520	2,363	2,249
64	3,993	3,143	2,751	2,518	2,361	2,246
65	3,991	3,140	2,748	2,515	2,358	2,244
66	3,989	3,138	2,746	2,513	2,356	2,242
67	3,986	3,136	2,744	2,511	2,354	2,239
68	3,984	3,134	2,742	2,509	2,352	2,237
69	3,982	3,132	2,739	2,507	2,350	2,235
70	3,980	3,130	2,737	2,505	2,348	2,233
71	3,978	3,128	2,736	2,503	2,346	2,231
72	3,976	3,126	2,734	2,501	2,344	2,229
73	3,974	3,124	2,732	2,499	2,342	2,227
74	3,972	3,122	2,730	2,497	2,340	2,226
75	3,970	3,120	2,728	2,495	2,338	2,224
76	3,968	3,119	2,727	2,494	2,337	2,222
77	3,967	3,117	2,725	2,492	2,335	2,220
78	3,965	3,115	2,723	2,490	2,333	2,219
79	3,963	3,114	2,722	2,489	2,332	2,217
80	3,962	3,112	2,720	2,487	2,330	2,216
81	3,960	3,111	2,719	2,486	2,329	2,214
82	3,959	3,109	2,717	2,484	2,327	2,213
83	3,957	3,108	2,716	2,483	2,326	2,211
84	3,956	3,107	2,715	2,482	2,324	2,210
85	3,955	3,105	2,713	2,480	2,323	2,209
86	3,953	3,104	2,712	2,479	2,322	2,207
87	3,952	3,103	2,711	2,478	2,321	2,206
88	3,951	3,101	2,709	2,476	2,319	2,205
89	3,949	3,100	2,708	2,475	2,318	2,203
90	3,948	3,099	2,707	2,474	2,317	2,202
91	3,947	3,098	2,706	2,473	2,316	2,201
92	3,945	3,095	2,704	2,471	2,313	2,199
93	3,943	3,094	2,703	2,470	2,312	2,198
94	3,942	3,093	2,701	2,469	2,311	2,197
95	3,941	3,092	2,700	2,467	2,310	2,196
96	3,940	3,091	2,699	2,466	2,309	2,195
97	3,939	3,090	2,698	2,465	2,308	2,194
98	3,938	3,089	2,697	2,465	2,307	2,193
99	3,937	3,088	2,696	2,464	2,306	2,192
100	3,936	3,087	2,696	2,463	2,305	2,191

Lampiran 8

Nilai T Tabel Pada Tingkat Keyakinan 95%

DF	Tingkat Keyakinan			
	99%	97,5%	95%	90%
1	63,656	25,452	12,706	6,314
2	9,925	6,205	4,303	2,920
3	5,841	4,177	3,182	2,353
4	4,604	3,495	2,776	2,132
5	4,032	3,163	2,571	2,015
6	3,707	2,969	2,447	1,943
7	3,499	2,841	2,365	1,895
8	3,355	2,752	2,306	1,860
9	3,250	2,685	2,262	1,833
10	3,169	2,634	2,228	1,812
11	3,106	2,593	2,201	1,796
12	3,055	2,560	2,179	1,782
13	3,012	2,533	2,160	1,771
14	2,977	2,510	2,145	1,761
15	2,947	2,490	2,131	1,753
16	2,921	2,473	2,120	1,746
17	2,898	2,458	2,110	1,740
18	2,878	2,445	2,101	1,734
19	2,861	2,433	2,093	1,729
20	2,845	2,423	2,086	1,725
21	2,831	2,414	2,080	1,721
22	2,819	2,405	2,074	1,717
23	2,807	2,398	2,069	1,714
24	2,797	2,391	2,064	1,711
25	2,787	2,385	2,060	1,708
26	2,779	2,379	2,056	1,706
27	2,771	2,373	2,052	1,703
28	2,763	2,368	2,048	1,701
29	2,756	2,364	2,045	1,699
30	2,750	2,360	2,042	1,697
31	2,744	2,356	2,040	1,696
32	2,738	2,352	2,037	1,694
33	2,733	2,348	2,035	1,692
34	2,728	2,345	2,032	1,691
35	2,724	2,342	2,030	1,690
36	2,719	2,339	2,028	1,688
37	2,715	2,336	2,026	1,687
38	2,712	2,334	2,024	1,686
39	2,708	2,331	2,023	1,685
40	2,704	2,329	2,021	1,684
41	2,701	2,327	2,020	1,683
42	2,698	2,325	2,018	1,682
43	2,695	2,323	2,017	1,681
44	2,692	2,321	2,015	1,680
45	2,690	2,319	2,014	1,679
46	2,687	2,317	2,013	1,679
47	2,685	2,315	2,012	1,678
48	2,682	2,314	2,011	1,677
49	2,680	2,312	2,010	1,677
50	2,678	2,311	2,009	1,676

DF	Tingkat Keyakinan			
	99%	97,5%	95%	90%
51	2,676	2,310	2,008	1,675
52	2,674	2,308	2,007	1,675
53	2,672	2,307	2,006	1,674
54	2,670	2,306	2,005	1,674
55	2,668	2,304	2,004	1,673
56	2,667	2,303	2,003	1,673
57	2,665	2,302	2,002	1,672
58	2,663	2,301	2,002	1,672
59	2,662	2,300	2,001	1,671
60	2,660	2,299	2,000	1,671
61	2,659	2,298	2,000	1,670
62	2,657	2,297	1,999	1,670
63	2,656	2,296	1,998	1,669
64	2,655	2,295	1,998	1,669
65	2,654	2,295	1,997	1,669
66	2,652	2,294	1,997	1,668
67	2,651	2,293	1,996	1,668
68	2,650	2,292	1,995	1,668
69	2,649	2,291	1,995	1,667
70	2,648	2,291	1,994	1,667
71	2,647	2,290	1,994	1,667
72	2,646	2,289	1,993	1,666
73	2,645	2,289	1,993	1,666
74	2,644	2,288	1,993	1,666
75	2,643	2,287	1,992	1,665
76	2,642	2,287	1,992	1,665
77	2,641	2,286	1,991	1,665
78	2,640	2,285	1,991	1,665
79	2,639	2,285	1,990	1,664
80	2,639	2,284	1,990	1,664
81	2,638	2,284	1,990	1,664
82	2,637	2,283	1,989	1,664
83	2,636	2,283	1,989	1,663
84	2,636	2,282	1,989	1,663
85	2,635	2,282	1,988	1,663
86	2,634	2,281	1,988	1,663
87	2,634	2,281	1,988	1,663
88	2,633	2,280	1,987	1,662
89	2,632	2,280	1,987	1,662
90	2,632	2,280	1,987	1,662
91	2,631	2,279	1,986	1,662
92	2,630	2,279	1,986	1,662
93	2,630	2,278	1,986	1,661
94	2,629	2,278	1,986	1,661
95	2,629	2,277	1,985	1,661
96	2,628	2,277	1,985	1,661
97	2,627	2,277	1,985	1,661
98	2,627	2,276	1,984	1,661
99	2,626	2,276	1,984	1,660
100	2,626	2,276	1,984	1,660

Lampiran 9

Nilai-Nilai r Product Moment Pada Keyakinan 95%

n	Nilai r	n	Nilai r	n	Nilai r
3	0,997	27	0,381	55	0,266
4	0,950	28	0,374	60	0,254
5	0,878	29	0,367	65	0,244
6	0,811	30	0,361	70	0,235
7	0,754	31	0,355	75	0,227
8	0,707	32	0,349	80	0,220
9	0,666	33	0,344	85	0,213
10	0,632	34	0,339	90	0,207
11	0,602	35	0,334	95	0,202
12	0,576	36	0,329	96	0,200
13	0,553	37	0,325	97	0,198
14	0,532	38	0,320	100	0,194
15	0,514	39	0,316	125	0,176
16	0,497	40	0,312	150	0,159
17	0,482	41	0,308	175	0,148
18	0,468	42	0,304	200	0,138
19	0,456	43	0,301	300	0,113
20	0,444	44	0,297	400	0,098
21	0,433	45	0,294	500	0,088
22	0,423	46	0,291	600	0,080
23	0,413	47	0,288	700	0,074
24	0,404	48	0,284	800	0,070
25	0,396	49	0,281	900	0,065
26	0,388	50	0,279	1000	0,062

Note: n = Jumlah Sampel